



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KANTOR WILAYAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tahun Anggaran 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka, Pangkalpinang 33684

Telepon : (0717) 439439

Laman : babel.kemenkumham.go.id Surel : kanwilbabel@kemenkumham.go.id

Nomor : W.7-PR.01.04-349
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2022

13 Januari 2022

Yth. Inspektur Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
di Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan sebagaimana dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

Demikian atas perhatian perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto
NIP 196504081987031002

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2022. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran yang akan datang.

Pangkalpinang, 13 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH

HARUN SULIANTO
NIP 196504081987031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	19
D. ASPEK STRATEGIS.....	19
E. ISU STRATEGIS	19
F. SISTEMATIKA LAPORAN	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
A. RENCANA STRATEGIS 2020 -2024	30
B. PERJANJIAN KINERJA.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	40
B. REALISASI ANGGARAN.....	183
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	184
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	187
E. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	194
BAB IV PENUTUP.....	
1. KESIMPULAN.....	195
2. SARAN	197

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
1.1	Keadaan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah	18
1.2	Isu Strategis/Permasalahan yang dihadapi Divisi Jajaran Kantor Wilayah	20
2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	35
2.2	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022	41
2.3	Rekapitulasi Hasil Survey Inregritas	45
3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja SK I dan IKK 1	46
3.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1	47
3.3	Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1	47
3.4	Perbandingan Target dan Realisasi SK II IKK 1 tahun 2022	49
3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II dan IKK 1	50
3.6	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1	50
3.7	Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Remisi Tahun 2022	50
3.8	Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi Tahun 2022	51
3.9	Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Tahun 2022	51
3.10	Rekapitulasi Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilaku menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Tahun 2022	52
3.11	Rekapitulasi Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2022	52
3.12	Rekapitulasi Narapidana yang bekerja dan Produktif Tahun 2022	53

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.13	Rekapitulasi Narapidana mengikuti Pendidikan Tinggi Tahun 2022	53
3.14	Rekapitulasi klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga Tahun 2022	54
3.15	Rekapitulasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2022	54
3.16	Rekapitulasi klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2022	54
3.17	Rekapitulasi anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat Tahun 2022	55
3.18	Rekapitulasi anak yang memperoleh hak integrasi Tahun 2022	55
3.19	Rekapitulasi anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar Tahun 2022	56
3.20	Rekapitulasi anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2022	56
3.21	Rekapitulasi pengaduan yang diselesaikan Tahun 2022	57
3.22	Rekapitulasi pencegahan gangguan kamtib Tahun 2022	57
3.23	Rekapitulasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2022	58
3.24	Rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2022	59
3.25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Tahun 2022	60
3.26	Persentase capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	61
3.27	Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di wilayah Tahun 2022	61

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.28	Persentase capaian Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)	62
3.29	Perbandingan Capaian Kinerja Program berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	74
3.30	Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah	77
3.31	Nilai Smart DJA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022	78
3.32	Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022	80
3.33	Capain Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	81
3.34	Capaian Target Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2022	86
3.35	Capaian Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2022	87
3.34	Capaian Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022	88
3.36	Perbandingan Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021 dan 2022	87
3.37	Capaian Target Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2022	86
3.38	Perbandingan Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021 dan 2022	90
3.39	Capaian Realisasi Anggaran pada e-Monev Bappenas Kantor Wilayah Tahun 2022	91

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi Kantor Wilayah	17
2.1	Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM	33

DAFTAR **GRAFIK**

NO. GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	76
3.2	Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022	90

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung hampir memenuhi target dilihat dari serapan anggaran yang merupakan cermin pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 (per 31 Desember 2022) dapat terserap dengan maksimal dari Pagu Rupiah Murni 9 DIPA adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah (9 DIPA)
DIPA (Rp) : Rp 20.174.964.000,- Realisasi (Rp) : Rp 20.156.978.503,-
Persentase (%) : 99,91%
2. Realisasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis (11 Satker)
DIPA (Rp) : Rp 90.994.265.000,- Realisasi (Rp) : Rp 90.133.489.586,-
Persentase (%) : 99,05%
3. Realisasi Anggaran Keseluruhan (9 DIPA dan 11 Satker)
DIPA (Rp) : Rp 111.169.229.000,- Realisasi (Rp) : Rp 110.290.468.089,-
Persentase (%) : 99,21%

Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai “**PASTI**” yaitu **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif**. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada 9 program dengan menggunakan 22 sasaran serta untuk pengukurannya menggunakan 59 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencapai 186% yang didapat dari realisasi capaian dibandingkan dengan 59 target capaian kinerja.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan perubahan dalam hal

pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui inovasi Layanan Porsibel (Portal Informasi Layanan Kanwil Kumham Babel). Layanan Porsibel merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan website resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan laman *babel.kemenkumham.go.id*. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung di era situasi pandemi covid-19 tanpa harus datang langsung atau tatap muka. Layanan Porsibel terdiri dari Layanan Notaris, Permohonan Pelantikan Notaris, Konsultasi Hukum *Online*, Harmonisasi Peraturan Daerah, Permohonan Pelantikan PPNS, Bantuan Hukum dan Pengaduan Layanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang.

Terselenggaranya *good governance* harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap kuasa pengguna anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja. Dalam hal ini kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Kepulauan Bangka Belitung membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Perundang – Undangan yang berlaku. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh 11 (Sebelas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis Masyarakat dan 2 (Dua) Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian antara lain :

1. Lembaga Masyarakat Kelas II Pangkalpinang;
2. Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas II Pangkalpinang;
3. Lembaga Masyarakat Kelas IIB Tanjung Pandan;

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
5. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
6. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sungailiat;
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
9. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang;
10. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
11. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan.

Gambar 1.1 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Babel



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor

Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari :

- 1) Bagian Program dan Humas
- 2) Bagian Umum

II. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi

informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;

- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari :

- 1) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
- 2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

III. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari :

- 1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

IV. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- 1) Bidang Pelayanan Hukum
- 2) Bidang Hukum
- 3) Bidang Hak Asasi Manusia

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kantor Wilayah



Pada Tahun 2022, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 752 orang sebagai berikut :

1. Pimpinan Tinggi Pratama : 4 orang
2. Pejabat Administrator : 16 orang
3. Pejabat Pengawas : 52 orang
4. Pejabat Pelaksana : 66 orang
5. Pejabat Fungsional Tertentu : 137 orang
6. Pejabat Fungsional Umum : 477 orang

**Tabel 1.1 KEADAAN PEGAWAI DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2022**

NO	SATKER	TAHUN							
		2021				2022			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Kantor Wilayah	-	6	77	19	-	7	91	19
2	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	-	31	42	2	-	32	45	2
3	Lapas Kelas II Narkotika Pangkalpinang	-	40	33	1	-	45	32	1
4	Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	-	3	48	1	-	11	48	2
5	Lapas Klas IIB Tanjungpandan	-	23	23	-	-	24	23	-
6	Lapas Klas IIB Sungailiat	-	31	38	1	-	31	41	1
7	Imigrasi Klas II Tanjungpandan	-	1	28	1	-	8	28	1
8	LPKA Kelas II Pangkalpinang	-	44	15	1	-	44	17	1
9	Rumah Tahanan Negara Muntok	-	18	24	1	-	19	26	1
10	BAPAS Kelas II Pangkalpinang	-	1	35	-	-	1	39	-
11	RUPBASAN Kelas II Pangkalpinang	-	3	13	1	-	3	15	1
12	LPP Kelas III Pangkalpinang	-	49	7	-	-	47	7	1
13	CPNS	-	36	20	-	-	34	4	-
	JUMLAH	-	286	404	28		306	416	30
	TOTAL	717				752			

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*). Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dalam lingkup lebih kecil yaitu lingkup Provinsi. Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung diantaranya dalam rangka Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian, Pelayanan bidang pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan, Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta pengaduan dalam komunikasi masyarakat terkait HAM.

E. ISU STRATEGIS

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan

pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Upaya untuk mencapai Kinerja Pemerintahan yang baik telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek kinerja yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Divisi Jajaran Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Isu Strategis/Permasalahan yang dihadapi Divisi Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung TA 2022

SUB ORGANISASI	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN 2022
DIVISI ADMINISTRASI		
Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Akun Antigen/PCR	Adanya penurunan harga untuk Test Antigen/PCR berimbas pada Pemakaian Akun untuk Test Antigen/PCR yang berlebih tidak bisa direvisi sehingga anggaran yang bersisa tidak bisa dioptimalkan
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan rumah tangga	Kepegawaian	1. Gaji (Penghasilan) PPNP belum sesuai dengan UMP dan/atau PMK Standar Biaya Masukan 2. Belum terlindunginya PPNP oleh BPJS Ketenagakerjaan 3. Tidak Ada nya postur anggaran Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian dan Tata Usaha pada UPT 4. Belum maksimalnya penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas
	Kearsipan	1. Belum maksimalnya penggunaan anggaran untuk keperluan pengarsipan yang baik dan aman (lemari penyimpanan arsip)

	Anggaran	1. Belum adanya Sosialisasi RKAKL 2. Belum maksimalnya penggunaan anggaran untuk pemeliharaan/renovasi Gedung
Subbagian Program dan Pelaporan	Adanya pandemi covid-19	1. Mengalami <i>refocusing</i> anggaran sehingga terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Selama pandemi covid-19 seluruh kegiatan menggunakan aplikasi zoom dimana dirasa kurang maksimal dalam kegiatan yg mengharuskan tatap muka bersama satuan kerja
	Aplikasi e-Monev dan SMART DJA	Belum adanya <i>User ID</i> bagi Kantor Wilayah yang dapat digunakan sebagai Monitoring penginputan aplikasi e-Monev dan SMART DJA pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
	Pelaporan	Belum adanya keseragaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sehingga menjadi temuan Inspektorat Jenderal
Subbagian Reformasi Birokrasi Humas, dan TI	Pelaksanaan kehumasan selama pandemi covid 19 menurun	1. Pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang/ ditiadakan selama masa pandemi covid 19, diubah pelaksanaannya hanya secara virtual 2. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur di bidang Humas. Perangkat yang sangat dibutuhkan saat ini adalah lisensi freepik yang mengakomodir download ilustrasi dan elemen desain sehingga dengan berkembangnya TI yang begitu cepat dapat mendukung terhadap kinerja Humas
	Kualitas SDM perlu ditingkatkan	1. perlu dilaksanakan diklat & bimtek bagi pegawai khususnya tentang keprotokolan, kehumasan, dan teknologi informasi 2. kurangnya JFT Pranata Humas yang berperan sebagai agen yang bisa menyampaikan komunikasi dan informasi secara baik dan jelas karena berbagai informasi harus dengan cepat dapat diakses oleh masyarakat

DIVISI KEIMIGRASIAN		
Sub Bidang Perizinan	Pelayanan Keimigrasian di masa pandemi Covid-19	1. Kondisi masa Pandemi Covid-19 pelayanan keimigrasian harus tetap dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19 bagi petugas dan pemohon layanan Keimigrasian; 2. Bagaimana inovasi di Masa Pandemi Covid-19 agar meningkatkan PNBP dengan mendorong masyarakat untuk membuat Paspor.
Sub Bidang Informasi Keimigrasian	Pelayanan Keimigrasian di masa pandemi Covid-19	Sistem Jaringan yang sering error
Sub Bidang Intelijen Keimigrasian	Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi geografis Bangka Belitung yang dipisahkan oleh Lautan dan Tenaga Kerja Asing yang berada di lautan	1. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah; 2. Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap untuk kebutuhan Pengawasan Orang asing; 3. Aturan PPKM yang membatasi pergerakan dalam pengawasan.
Sub Bidang Intelijen Keimigrasian	Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi geografis Bangka Belitung yang dipisahkan oleh Lautan dan Tenaga Kerja Asing yang berada di lautan	Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap untuk kebutuhan Pengawasan Orang asing;
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM		
Bidang Hukum	Pembinaan dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1. Kondisi Pandemi Covid-19 membuat pembinaan Desa Kadarkum menjadi terhambat. 2. Desa/Kelurahan Binaan maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum terlalu efektif dalam pembinaannya disebabkan masih minimnya pengetahuan SDM yang tersedia. 3. Anggaran pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan binaan yang terdampak dengan adanya realokasi anggaran untuk Covid-19

	Bantuan Hukum	1. Sebaran OBH yang masih belum merata di setiap Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Belum tersedianya kuisisioner pemberian layanan bantuan hukum pada aplikasi Sidbankum (Sistem Informasi Bantuan Hukum); 3. Belum meratanya standar layanan bantuan hukum pada setiap OBH yang terakreditasi; 4. Masih terdapat OBH yang melakukan penyimpangan terkait pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
	Prolegda/Propemperda	1. Kabupaten/Kota belum memahamisecara jelas apa yang dimaksud dengan Prolegda dan bagaimana pelaksanaannya penyusunannya. 2. Pelaksanaan Prolegda di setiap daerah masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih ada Raperda yang muncul di pertengahan tahun yang tidak masuk dalam Propemperda yang telah ditandatangani.
	Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik	1. Sarana dan Prasarana seperti ruang rapat untuk harmonisasi dan penyusunan Naskah Akademik tidak tersedia secara permanen; 2. Masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan pengharmonisasian ke Kantor Wilayah yang disebabkan oleh ego sektoral;
	Analisa dan Evaluasi Hukum	1. Belum maksimalnya pelaksanaan di lapangan disebabkan minimnya pengetahuan dari pelaksana, karena merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2020; 2. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari berbagai instansi/<i>stakeholder</i> terkait, namun tidak berjalan sebagaimana semestinya.

	Dokumentasi dan Informasi Hukum	1. Pemahaman dan pengetahuan anggota tim yang masih kurang mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2. Koordinasi Instansi terkait Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung masih kurang; 3. Otomasi belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran; 4. Ruang JDIH belum representatif (terbuka), sehingga keamanan dan perawatan buku tidak optimal; 5. Belum maksimalnya pengelolaan <i>website</i>, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan SDM terkait informasi dan teknologi.
Bidang Pelayanan Hukum dan HAM	Presentase Peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Kurangnya akses layanan Administrasi hukum umum pada kantor Wilayah. Hingga saat ini akses layanan terpusat di Ditjen AHU.
	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris di wilayah	Belum terbentuknya MPDN pada semua Kabupaten yang ada di wilayah Bangka Belitung, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengawasan oleh MPDN terhadap pelaksanaan tugas Jabatan serta kode etik Notaris;
	Jumlah permohonan Kiyang di fasilitasi Kantor Wilayah	Belum optimalnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kep. Bangka Belitung, hal tersebut disebabkan dengan masih rendahnya kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya Kekayaan Intelektual terhadap sebuah produk.
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual di wilayah	1. Kecilnya minat UMKM untuk memahami kekayaan intelektual sehingga peserta yang mengikuti diseminasi dan promosi kekayaan intelektual tidak variatif. 2. Tidak terjangkaunya pelaku UMKM di daerah terpencil sehingga diseminasi dan promosi kekayaan intelektual tidak tersampaikan secara maksimal kepada seluruh UMKM di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	1. Kurangnya pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang hanya dilakukan sebanyak 2x per tahun. 2. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran kekayaan intelektual 3. Minimnya laporan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah.
	Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	1. Kurangnya anggaran dari MPIG untuk melakukan tahap-tahap pengujian IG Madu Teran Belitong Timur. 2. Masih lemahnya peran pemerintah untuk melakukan inventarisasi terhadap keanekaragaman hasil alam yang menjadi potensi indikasi geografis. 3. geografis.
Bidang Hak Asasi Manusia	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah tentang Aksi HAM dan KKP HAM terutama keterlibatan dan koordinasi beberapa OPD; 2. Masing-masing OPD terkait belum mempunyai program Aksi HAM; 3. Pada saat terjadi mutasi tugas, Pemdasing berganti jabatan dan lemahnya pemahaman atas program Aksi HAM sehingga menyebabkan program Aksi HAM tidak dilaksanakan secara optimal; 4. Program kerja monev aksi HAM tidak berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah disusun awal tahun; 5. Belum adanya bidang yang khusus menangani HAM di Pemda yang berdampak pada sisi penganggaran sehingga Pemda sering kesulitan dalam mengimplementasi aksi HAM;
	Jumlah Kabupaten Kota Peduli HAM	1. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah tentang KKP HAM terutama keterlibatan dan koordinasi beberapa OPD; 2. Perubahan kriteria penilaian KKP HAM yang lebih rumit daripada tahun sebelumnya; 3. Belum adanya bidang yang khusus menangani HAM di Pemda yang

		berdampak pada sisi penganggaran sehingga Pemda sering kesulitan dalam mengimplementasi aksi HAM.
	Jumlah instansi yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1. Belum semua UPT memahami kriteria pelayanan publik berbasis HAM; 2. Dukungan anggaran perlu diperhatikan, mengingat tidak adanya anggarankhusus pada UPT dalam mendukung P5HAM terutama pemenuhan sarpas terkait P2HAM; 3. Pembinaan lembaga publik berbasis Ham di tingkat Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut terutama kriteria yang harus dipenuhi oleh UPTD.
	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM diwilayah	1. Minimnya inisiatif dari pihak yang mengalami dugaan pelanggaran HAM ringan untuk melapor ke Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung; 2. Ada beberapa pengaduan yang masuk akan tetapi pada saat akan dipertemukan untuk mencari jalan penyelesaian para pihak yang berwenang tidak hadir. 3. Masih minimnya pengetahuan operator aplikasi SIMASHAM.
	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	1. Belum adanya SDM dengan formasi jabatan analis kebijakan di Kanwil yang dapat mendukung proses pembuatan kebijakan yang lebih optimal sehingga rekomendasi yang dihasilkan bisa lebih berkualitas. 2. Kurangnya penyampaian dan pemanfaatan laporan hasil analisa kebijakan serta tidak semua rekomendasi yang diberikan kepada stakeholder atau Pimpinan UPT yang mendapat respon positif/ditindaklanjuti segera. 3. Anggaran Kajian sebagai bahan penelitian dan pengembangan

		hukum dan HAM yang mengalami pemblokiran sehingga kegiatan tidak terlaksana maksimal.
	Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasi di wilayah	Kurangnya sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media berbagai platform untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi Hukum, HAM dan Pelayanan Publik maupun hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM.
DIVISI PEMASYARAKATAN		
		1. Tidak terkoneksinya jaringan antara UPT dengan Instansi Penegak Hukum terkait pertukaran data dalam sistem peradilan pidana terpadu teknologi informasi (SPPT-TI); 2. Proses fasilitasi bantuan hukum yang diberikan tergantung dari permohonan masing-masing tahanan yang bersangkutan sehingga masih kecilnya persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan belum maksimal di karenakan beberapa Lapas belum melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat 4. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi belum mencapai target yang telah di tentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hal ini dikarenakan adanya pergeseran anggaran untuk kebutuhan BAMA 5. Belum adanya narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi karena belum adanya kerja sama

		yang dilakukan Lapas dengan Perguruan Tinggi
--	--	--

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan lapooran kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF : Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja serta menyajikan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran dan menjelaskan capaian kinerja anggaran serta capaian kinerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja dan strategi pencapaian kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
- Prestasi dan Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- 1) Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4) Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- 5) Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Misi ke-7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Adapun Tujuannya merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- 3) Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 4) Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;

- 5) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan; dan
- 7) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif**. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Profesional adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
- b) Akuntabel adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c) Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait;

- d) Transparan adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai; dan
- e) Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain itu sejak 27 Juli 2021 silam, Kementerian PAN-RB meluncurkan *core values* dan *employer branding* baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, BerAKHLAK dikenalkan sebagai *core values* ASN seluruh Indonesia dan #banggamelayanibangsa sebagai *employer branding* ASN.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *employer branding* ASN zaman *now* yang melayani sepenuh hati.

- a. Berorientasi Pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti;
- b. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c. Kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

- d. Harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. Loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif; dan
- g. Kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja dan Reviu terhadap Laporan Kinerja.

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana

strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun perjanjian kinerja yang berisikan tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA 2022
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2022	Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal			
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	Rp. 13.792.510.000
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan			
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	Rp.24.416.551.000
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	
	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	
	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80%	

Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	
	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	
	Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30 Orang	
Meningkatnya pelayanan pengelolaan barang-barang di Wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	50%	
	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	
	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengantasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	
	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	

Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	
	Persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar	80%	
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
Direktorat Jenderal Imigrasi			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	Rp 9.461.525.000
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum			
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Rp. 1.858.350.000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual			

Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	16 Layanan	Rp. 753.549.000
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	
Direktorat Jenderal Perundang-Undangan			
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Rp. 172.285.000,-
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang	
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia			
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	Rp.242.497.000
	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	
Badan Pembinaan Hukum Nasional			
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Rp 920.279.000,-

Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	
Badan Penelitian dan Pengembangan			
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	Rp. 203.065.000
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum / pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada akuntabilitas kinerja ini, dihitung capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi pada Tahun 2022.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dilakukan per indikator kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Sekretariat Jenderal					
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.8 Indeks	125%
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan					
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	80%	100%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	88%	110%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	67%	84%
3	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	93%	143%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	97%	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	126%	158%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	70%	88%
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	100%	667%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	38%	136%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	149%
		8. Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30 Orang	-	-
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	100%	143%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	100%	167%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	82%	164%

LKjIP TAHUN 2022
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	pendidikan klien anak pada luar lembaga di Wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	51%	85%
		3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	73%	243%
6	Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	62.5%	83%
		2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar	80%	87%	109%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	84%	105%
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	143%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%
8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	143%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%
Direktorat Jenderal Imigrasi					
9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	3,99 Indeks	124,68%
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,85 Indeks	123,39 %
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum					
10	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	12%	125%
11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	100 %	119 %

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual					
12	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	17 Permohonan	43 Permohonan	252 %
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400 %
13	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100%	Nihil	Nihil
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100 %
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Direktorat Jenderal Perundang-Undangan					
14	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80 %	100 %	125 %
15	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 Orang	30 orang	187 %
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia					
16	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	8 Instansi Pemerintah	400 %
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200 %
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	-	- (tidak dilaksanakan penilaian)
17	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100 %
Badan Pembinaan Hukum Nasional					
18	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta penentuan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150%
19	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	100%	123%

LKjIP TAHUN 2022
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

	wilayah	2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	125%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	80%	104%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	142 %
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100%	500 %
Badan Penelitian dan Pengembangan					
20	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100 %	125 %
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %

SASARAN KEGIATAN 1
Terwujudnya Layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah dengan target 3,1 Indeks.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja indeks diperoleh melalui mekanisme pengisian Survei Integritas melalui Aplikasi 3AS dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang dapat diakses pada laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Survey Integritas yang dilakukan terhadap layanan Kantor Wilayah meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- Budaya organisasi dan sistem anti korupsi;
- Integritas kerja terkait pengelolaan SDM;
- Integritas dan pelaksanaan anggaran; dan
- Integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.

Adapun rekapitulasi hasil Survey Integritas terhadap layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Survey Inregritas

BULAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS SISTEM ANTI KORUPSI	INDEKS SDM	INDEKS ANGGARAN	INDEKS ATURAN DAN NORMA	NILAI TOTAL INDEKS
Januari	67	94.03	94.35	93.85	94.15	93.85
Februari	86	94.32	94.35	93.60	93.94	94.06
Maret	50	93.90	94.62	92.58	94.33	93.86
April	35	97.82	98.16	96.31	98.69	97.75

Mei	60	95.28	95.75	94.65	95.56	95.31
Juni	41	96.34	97.04	95.83	96.14	96.34
Juli	54	96.16	96.30	95.60	95.76	95.95
Agustus	72	96.76	96.53	95.31	96.35	96.24
September	50	95.19	94.62	94.08	95.42	94.83
Oktober	30	99.68	99.84	99.58	99.86	99.74
November	32	99.85	99.85	98.31	100	99.50
Desember	31	99.77	99.62	99.06	99.87	99.58

Berdasarkan hasil survey integritas sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember diperoleh nilai total untuk Tahun 2022 sebesar **96.41** (skala 100), namun untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal (dengan skala 4) sesuai dengan skala indeks yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka perlu dilakukan konversi atau penyesuaian, sehingga didapat Indeks Kepuasan Layanan Internal Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar **3.8** (dari nilai maksimal 4). Berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Internal tersebut dapat dihitung capaian Indikator Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal}}{\text{Target Indeks Kepuasan Layanan Internal}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3.8}{3.1} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diperoleh Capaian Indeks Kepuasan Layanan Internal pada Tahun 2022 sebesar 125%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK I dan IKK I Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.8 Indeks	125 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal tahun 2021 sebesar 3.5 indeks meningkat pada tahun 2022 sebesar 3.8 indeks.

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK I
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.5 Indeks	114%	3.1 Indeks	3.8 Indeks	125%

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target yang ada di pada Rencana Strategis memiliki skala yang berbeda dengan target pada Perjanjian Kinerja, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Tabel 3.5 Target Jangka Menengah SK I dan IKK I

Indikator	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	7,2 Indeks	7,21 Indeks	7,22 Indeks	7,23 Indeks	3,8 Indeks	125%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat target jangka menengah dalam Renstra menggunakan skala 10 (sepuluh) sedangkan target pada Perjanjian Kinerja menggunakan skala 4 (empat).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor

Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Layanan internal yang disediakan oleh Kantor Wilayah untuk seluruh pegawai yang meliputi layanan fasilitatif dan administratif masuk dalam kategori memuaskan berdasarkan Survey Integritas yang telah dilaksanakan. Adapun penyebab keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh :

- a) Sosialisasi dan internalisasi budaya anti korupsi dan penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan setiap apel pagi, pemasangan spanduk dan banner terkait anti korupsi dan gratifikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Monitoring dan pendampingan kepada satuan kerja berkenaan dengan penyusunan kebutuhan pegawai;
- c) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran melalui pendampingan langsung melalui operator pada pelaksanaan Supervisi Pagu Indikatif serta Supervisi Pagu Anggaran;
- d) Monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah sampai dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- e) Sosialisasi dan internalisasi norma dan aturan melalui SPIP.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 3 (tiga) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase menurunnya tahanan yang overstaying”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase menurunnya tahanan yang overstaying. Pada tahun 2022 terdapat jumlah rata-rata tahanan yang overstaying sebanyak 74 tahanan dari jumlah rata-rata

seluruh tahanan sebanyak 372 orang. Target yang ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi sebesar 80% dengan formulasi sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - \text{Jumlah tahanan yang overstaying}}{\text{Jumlah seluruh Tahanan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{372 - 74}{372} \times 100 \%$$

$$\% = 80\%$$

Dari penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut telah terjadinya penurunan terhadap tahanan yang overstaying dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan target sebesar 80%. Masih terdapat sekitar 20% dari data diatas terhadap menurunnya tahanan yang overstaying tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman kelengkapan berkas dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Wilayah. Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 100% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Target dan Realisasi SK II IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80 %	80 %	100 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase menurunnya tahanan yang overstaying di Lapas/Rutan/ telah tercapai. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% dengan sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 70% meningkat pada tahun 2022 sebesar 10% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II dan IKK 1
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	70%	100%	80 %	80 %	100 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kesamaan capaian yaitu 100%, walaupun terdapat perbedaan target di tahun 2021 sebesar 70% dan di tahun 2022 sebesar 80% tetapi realisasi dan capaian nya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Target capaian kinerja untuk Indikator Persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan tahun 2022 sebesar 800% dengan realisasi 80%.

Tabel 3.8 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Telah terjadinya penurunan tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan dengan realisasi yang telah mencapai target. Masih terdapat sekitar 20% dari data diatas terhadap menurunnya tahanan yang overstaying tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman kelengkapan berkas dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pada indikator persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Lapas/Rutan tersebut yaitu diperlukan suatu kordinasi yang baik antara para Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan Pihak Lapas/Rutan, namun dalam hal ini untuk lebih memudahkan suatu kordinasi antara para penegak hukum yang lain (antara Rutan dan penahan) dibutuhkan suatu system IT dalam melakukan suatu koordinasi sehingga apabila ada terdakwa atau tersangka masa penahanannya akan habis maka dapat dikordinasikan langsung kepada pihak penahan sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak penahan tanpa menggunakan surat tetapi langsung tersambung dengan pihak Lapas/Rutan, sehingga surat penahanannya dapat diperbaharui dengan cepat dan status Hukum dari terdakwa dan tersangka dapat jelas, dan overstaying dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dari permasalahan Lapas/Rutan saat ini.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan. Di tahun 2022 terdapat Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum sebanyak 329 orang dengan jumlah tahanan sebanyak 372 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang menerima layanan penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah Tahanan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{329}{372} \times 100 \%$$

$$\% = 88\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{88\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$Capaian = 110\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 110% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80 %	88 %	110 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di Lapas/Rutan/ telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 88% sehingga capaian kinerjanya adalah 110%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 70% meningkat pada tahun 2022 sebesar 18% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II dan IKK 2

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70%	70%	100%	80 %	88 %	110 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kenaikan capaian dari 100% menjadi 110%, hal itu dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 70%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Target capaian kinerja untuk Indikator Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan tahun 2022 sebesar 110% dengan realisasi 88%.

Tabel 3.11 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70 %	80 %	80 %	80 %	88 %	110 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lapas/Rutan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab terjadinya keberhasilan pada indikator Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dikarenakan banyaknya Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Pihak ke 3 maupun dari Kantor Wilayah terhadap Lapas/Rutan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum yaitu dengan membuat jadwal pelaksanaan pelayanan hukum kepada tahanan dengan memanfaatkan Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Lapas/Rutan. Di tahun 2022 terdapat Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum sebanyak 250 orang dengan jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum sebanyak 372 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung realisasinya sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh Bankum}}{\text{Jumlah Tahanan yang mengajukan Bankum}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{250}{372} \times 100 \%$$

$$\% = 67\%$$

Dari hasil persentase diatas dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{67\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 84\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 84%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	80 %	67 %	84 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 67% sehingga capaian kinerjanya adalah 84%, ini disebabkan karena masih sedikitnya jumlah tahanan yang ingin memperoleh

fasilitas bantuan hukum.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Lapas/Rutan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 67% menurun pada tahun 2022 sebesar 3% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II dan IKK 3

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	70%	70%	100%	80 %	67 %	84 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 100% dengan realisasi sebesar 70%, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 sebesar 84% dengan realisasi sebesar 67%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 belum terlampaui. Target capaian kinerja untuk Indikator Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Lapas/Rutan tahun 2022 menurun sebesar 84% dengan realisasi 67%.

Tabel 3.14 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	70 %	80 %	80 %	80 %	67 %	84 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini

pengukuran Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Lapas/Rutan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Kegagalan

Pada indikator kinerja persentase jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum terjadi penurunan dikarenakan proses fasilitasi bantuan hukum yang diberikan tergantung dari permohonan masing-masing tahanan yang bersangkutan, ada tahanan yang mendapat hukuman tahanan tidak terlalu berat (1 tahun) tidak mengajukan permohonan bantuan hukum. Sehingga target pada indikator kegiatan ini tidak tercapai.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum yaitu dengan cara terus melakukan sosialisasi bantuan hukum kepada tahanan yang benar-benar membutuhkan.

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 8 (delapan) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian. Pada Tahun 2022 terdapat Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik sebanyak 2348 orang dengan jumlah narapidana yang dinilai sebanyak 2520. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik}}{\text{Jumlah narapidana yang dinilai}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2348}{2520} \times 100 \%$$

$$\% = 93\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{93\%}{65\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 143\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 143% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	93 %	143 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 65% sedangkan realisasinya adalah 93% sehingga capaian kinerjanya adalah 143%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 93% meningkat pada tahun 2022 sebesar 33% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK 1
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	60%	60%	100%	65 %	93 %	143 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kenaikan capaian dari 100% menjadi 143%, adanya instrumen SPPN sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penilaian kepribadian, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 60%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 65%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tahun 2022 sebesar 143% dengan realisasi 93%.

Tabel 3.17 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60 %	65 %	65%	65 %	93 %	143 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan karena sekarang sudah ada instrumen SPPN sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penilaian kepribadian

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian yaitu dengan Pihak Lapas agar selalu konsisten memberikan pembinaan kepribadian bagi WBP yang bekerjasama dengan Pihak terkait sehingga dengan banyaknya pembinaan kepribadian maka penilaian kepribadian WBP dapat meningkat.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi. Berikut table narapidana yang mendapatkan hak remisi.

Tabel 3.18 Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi Tahun 2022

No	Jenis Remisi	Jumlah Napi yang di usulkan Remisi	Jumlah yang memperoleh Remisi
1	Remisi Imlek	11	11
2	Remisi Nyepi	0	0
3	Remisi Idul Fitri	1440	1380
4	Remisi Waisak	34	34
5	Remisi 17 Agustus	1450	1363
6	Remisi Natal	32	28
Total		2967	2816

Berdasarkan data diatas didapat penghitungan rekapitulasi narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh remisi}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2816}{2967} \times 100 \%$$

$$\% = 95\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{95\%}{98\%} \times 100 \%$$

$$Capaian = 97\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 99% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh hak remisi	98%	95 %	97 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target Persentase narapidana yang memperoleh hak remisi tidak tercapai dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 98% sedangkan realisasinya adalah 95% sehingga capaian kinerjanya adalah 97%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase narapidana yang memperoleh hak remisi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 97% sedangkan tahun 2022 sebesar 95% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK 2 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97%	100%	98 %	95 %	97%

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 100% menjadi 97% dikarenakan ada beberapa WBP yang di usulkan remisi telah

mendapatkan program pembinaan, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 97%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 98%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 belum terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2022 sebesar 97% dengan realisasi 95%.

Tabel 3.21 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97 %	98 %	98%	98 %	95 %	97 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Kegagalan

Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan sebagian narapidana yang diusulkan untuk mendapat hak remisi telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Terdapat penyesuaian dengan UU Pemasyarakatan yang terbaru, sehingga harus disampaikan kembali usulan remisi perbaikan serta adanya beberapa WBP yang di usulkan remisi telah mendapatkan program pembinaan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang mendapatkan hak remisi yaitu Divisi Pemasyarakatan terus melakukan atau mengupayakan supervisi kepada Lapas/Rutan dan LPKA terkait pengusulan remisi bagi narapidana maupun bagi anak didik sesuai dengan kalender pengusulan remisi di tahun berjalan sehingga tidak ada

keterlambatan dalam pengusulan remisi.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi. Pada Tahun 2022 terdapat Jumlah narapidana yang diusulkan integrasi sebanyak 1018 orang dengan jumlah narapidana yang memperoleh integrasi sebanyak 1282 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh integrasi}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan integrasi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{1282}{1018} \times 100 \%$$

$$\% = 126\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{126\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 158\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 158% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.22 Capaian Target dan Realisasi SKK III dan IKK 3 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	126 %	158 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 126% sehingga capaian kinerjanya adalah 158%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 126% meningkat pada tahun 2022 sebesar 51% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK 3 Tahun 2021 dan 2022

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	100%	80 %	126 %	158 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kenaikan capaian dari 100% menjadi 158% dikarenakan semua WBP yang di usulkan mendapatkan hak integrasi, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 75%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2022 sebesar 158% dengan realisasi 126%.

Tabel 3.24 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75 %	80 %	80%	80 %	126%	158 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini

pengukuran persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan semua WBP yang di usulkan mendapatkan hak integrasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang mendapatkan hak integrasi yaitu Divisi Pemasyarakatan terus melakukan supervisi kepada Lapas/Rutan dan LPKA terkait pengusulan hak integrasi bagi narapidana maupun bagi anak didik sehingga tidak ada keterlambatan dalam pengusulan hak integrasi.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan. Pada Tahun 2022 terdapat Jumlah narapidana yang memiliki latar belakang Pendidikan sebanyak 264 orang dengan jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan sebanyak 184 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Jumlah narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{184}{264} \times 100 \%$$

$$\% = 70\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{70\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 88\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 88% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.25 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 4 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	70 %	88 %

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa target Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan tidak mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 70% sehingga capaian kinerjanya adalah 88%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 75% menurun pada tahun 2022 sebesar 5% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SKK III dan IKK 4 Tahun 2021 dan 2022

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	75%	100%	80 %	70%	88 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 100% menjadi 88% dikarenakan dikarenakan ada beberapa Lembaga Masyarakat belum bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 75%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 belum terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tahun 2022 sebesar 88% dengan realisasi 70%.

Tabel 3.27 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75 %	80 %	80%	80 %	70%	88 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Kegagalan

Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan terdapat beberapa Lapas yang belum bekerja sama dengan Dinas Pendidikan terkait kegiatan Kejar Paket A, B, dan C.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana yang mendapatkan hak pendidikan yaitu dengan cara memerintahkan Lapas/Rutan yang belum melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk segera melaksanakan PKS sehingga Hak pendidikan bagi WBP dapat terpenuhi.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin. Pada Tahun 2022 rekapitulasi Narapidana Resiko Tinggi yang berubah

Perilaku menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin terdapat sebanyak 8 orang dengan jumlah narapidana yang beresiko tinggi sebanyak 8 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang berubah perilaku}}{\text{Jumlah narapidana yang beresiko tinggi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{8}{8} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{15\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 667\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 667% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.28 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 5 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	100 %	667%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 15% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 667%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 100% meningkat pada tahun 2022 sebesar 87%

dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK 5
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13%	13%	100%	15 %	100%	667 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 667% dikarenakan semua narapidana resiko tinggi telah sadar dan patuh, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 13%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 15%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Target capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin tahun 2022 sebesar 667% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.30 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13 %	15 %	15%	15 %	100%	667 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dikarenakan semua narapidana resiko tinggi telah sadar dan patuh.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pada narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin yaitu Pihak lapas agar melaksanakan pembinaan kepada Narapidana resiko tinggi dengan mengacu pada aturan yang telah ada.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Persentase narapidanan yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi. Pada Tahun 2022 terdapat jumlah target narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi sebanyak 1910 orang dengan jumlah napi yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi sebanyak 722 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan}}{\text{target narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{722}{1910} \times 100 \%$$

$$\% = 38\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{38\%}{28\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 136\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 136% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.31 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 6 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	38 %	136%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi dan bersertifikasi telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 28% sedangkan realisasinya adalah 38% sehingga capaian kinerjanya adalah 136%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 38% meningkat pada tahun 2022 sebesar 13% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK 6 Tahun 2021 dan 2022

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	25%	100%	28 %	38%	136 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 136% dikarenakan paket pelaksanaan pendidikan vokasi bersertifikat bertambah sehingga WBP yang mengikuti juga bertambah banyak, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 25%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 28%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2022 sebesar 136% dengan realisasi 38%.

Tabel 3.33 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25 %	28 %	28%	28 %	38%	136 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan paket pelaksanaan pendidikan vokasi bersertifikat bertambah sehingga WBP yang mengikuti juga bertambah banyak.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi berpendidikan yaitu agar pihak lapas dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi berpendidikan diberikan kepada WBP yang berbeda dalam setiap pelatihan nya sehingga banyak WBP yang mempunyai bekal keahlian bagi mereka setelah keluar dari Lapas/Rutan.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Persentase narapidana yang bekerja dan produktif”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana bekerja dan produktif. Pada Tahun 2022 terdapat jumlah narapidana yang asimilasi sebanyak 419 orang dengan jumlah napi yang bekerja dan produktif sebanyak 419 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang asimilasi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{419}{419} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{67\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 149\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 149% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.34 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 7 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana bekerja dan produktif	67%	100 %	149%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase narapidana yang bekerja dan produktif telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 67% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 149%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 100% meningkat pada tahun 2022 sebesar 38% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK 7
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana bekerja dan produktif	62%	62%	• 100%	67 %	100%	149 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 149% dikarenakan banyaknya jumlah WBP yang di usulkan asimilasi untuk bekerja di lingkungan Lapas/Rutan, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 62%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 67%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator persentase narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2022 sebesar 149% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.36 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62 %	67 %	67%	67 %	100%	149 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase narapidana yang bekerja dan produktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan banyaknya jumlah WBP yang di usulkan asimilasi untuk bekerja di lingkungan Lapas/Rutan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase narapidana yang bekerja dan produktif yaitu dengan cara memberikan pelatihan kerja dan pihak Lapas/Rutan agar benar-benar mempekerjakan WBP yang telah memenuhi persyaratan dan memang mempunyai keahlian pada bidangnya.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 8 “Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi. Pada Tahun 2022 tidak terdapat narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi atau bisa dikatakan NIHIL. Dengan demikian perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.37 Capaian Target dan Realisasi SK III dan IKK 8 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	NIHIL	NIHIL

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa persentase narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan belum adanya kerjasama dengan Peguruan Tinggi. Target yang ditetapkan adalah sebesar 30 orang sedangkan realisasinya adalah NIHIL sehingga capaian kinerjanya adalah NIHIL.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 sebesar 0%, dengan target yang ditetapkan sebanyak 30 orang, sehingga capaian indikatornya tidak tercapai. Dalam hal ini realisasi tidak mencapai target yang ditentukan karena data yang

didapat nihil. Serta pada tahun 2021 tidak terdapatnya indikator dimaksud.

**Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK 8
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	-	-	-	30 orang	NIHIL	NIHIL

Dari data diatas realisasi dan capaian indikatornya tidak mencapai target yang ditentukan dikarenakan belum adanya kerjasama dengan perguruan tinggi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 tidak terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator persentase narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi sebesar 0% dengan realisasi 0%.

Tabel 3.39 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 8

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	-	30 orang	30 orang	30 orang	0%	0 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Kegagalan

Pada indikator ini dikatakan belum mencapai target atau bisa dikatakan tidak berhasil dikarenakan pihak Lapas/Rutan belum melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, sehingga belum ada WBP atau Narapidana yang

mengikuti Pendidikan tinggi, dan tersendat dengan masalah biaya Pendidikan dimaksud.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi yaitu pihak Lapas/Rutan melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi.

SASARAN KEGIATAN 4
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai Standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya. Adapun semua basan baran yang terdapat di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang terjaga kualitas dan kuantitasnya yang berjumlah sebanyak 3.309 macam, dengan jumlah basan baran yang tersedia sebanyak 3.309 macam. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah basan baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya}}{\text{Jumlah basan baran yang tersedia}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{3309}{3309} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{70\%} \times 100 \%$$

Capaian = 143%

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 143% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.40 Capaian Target dan Realisasi SK IV dan IKK 1 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	100 %	143%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 143%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 60% meningkat pada tahun 2022 sebesar 40% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaasn dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	60%	100%	70 %	100%	143 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 143% dikarenakan semua basan baran yang ada telah terjaga kualitas dan kuantitasnya, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target

yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 70%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya tahun 2022 sebesar 143% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.42 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60 %	70 %	70%	70 %	100%	143 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan semua basan baran yang ada telah terjaga kualitas dan kuantitasnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya yaitu dengan cara melakukan pengecekan secara berkala.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap. Adapun Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang Inkrah sebanyak 19 macam, dengan jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi sebanyak 19 macam. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang inkrah}}{\text{Jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{19}{19} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{60\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 167\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 167% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.43 Capaian Target dan Realisasi SK IV dan IKK 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	100 %	167%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 60% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 167%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 40% meningkat pada tahun 2022 sebesar 60% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK 2
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	40%	40%	100%	60 %	100%	167 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 167% dikarenakan banyaknya basan baran yang di keluarkan berdasarkan putusan tetap, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 40%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 60%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase benda dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap tahun 2022 sebesar 167% dengan realisasi 100%.

Tabel 3.45 Target Jangka Menengah SK IV dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase benda dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	40 %	60 %	60%	60 %	100%	167 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase benda dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan banyaknya basan baran yang di keluarkan berdasarkan putusan tetap.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase benda dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap yaitu dengan cara berkoordinasi dengan APH terkait yang menitipkan barang-barang pada Rupbasan sehingga barang yang dititipkan status hukumnya jelas.

SASARAN KEGIATAN 5			
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien	Pelayanan	Pembimbingan	Klien
Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien			
Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar			

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 3 (tiga) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga. Adapun jumlah klien usia produktif sebanyak 807 orang, dengan Jumlah Klien yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga sebanyak 663 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan}}{\text{Jumlah klien usia produktif}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{663}{807} \times 100 \%$$

$$\% = 82\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{82\%}{50\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 164\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 164% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.46 Capaian Target dan Realisasi IKK SK V dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	50%	82 %	164%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 50% sedangkan realisasinya adalah 82% sehingga capaian kinerjanya adalah 164%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 40% meningkat pada tahun 2022 sebesar 42% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK V dan IKK 1 tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga berkuatan hukum tetap	40%	40%	100%	50 %	82%	164 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 164% dikarenakan telah banyak klien usia produktif yang melanjutkan pekerjaan setelah bebas dari Lapas, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 40%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 50%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga tahun 2022 sebesar 164% dengan realisasi 82%.

Tabel 3.48 Target Jangka Menengah SK V dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	40 %	50 %	50%	50 %	82%	164 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan telah banyak klien usia produktif yang melanjutkan pekerjaan setelah bebas dari Lapas.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga yaitu dengan cara Pihak Bapas melakukan kerjasama dengan Pihak terkait melalui Pokmas Pemasarakatan untuk memberikan wadah kepada Klien Pemasarakatan yang belum mendapatkan pekerjaan untuk bekerja pada Pokmas yang ada.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara. Di tahun 2022 jumlah jumlah kasus anak sebanyak 66 orang, dengan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebanyak 34 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara}}{\text{Jumlah Pendampingan Anak}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{34}{66} \times 100 \%$$

$$\% = 51\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{51\%}{60\%} \times 100 \%$$

$$Capaian = 85\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 85% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.49 Capaian Target dan Realisasi SK V dan IKK 2 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	51 %	85%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara tidak tercapai dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 60% sedangkan realisasinya adalah 51% sehingga capaian kinerjanya adalah 85%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 50% meningkat pada tahun 2022 sebesar 1% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK V dan IKK 2
tahun 2022 dan 2021**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	50%	100%	60 %	51%	85 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 100% menjadi 85%, dikarenakan tidak berhasilnya proses diversi, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 50%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 60%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 belum terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara tahun 2022 sebesar 85% dengan realisasi 51%.

Tabel 3.51 Target Jangka Menengah SK V dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %	60 %	60%	60 %	51%	85 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan ini dikatakan tidak mencapai target yang di tetapkan dikarenakan belum adanya kesepakatan perdamaian antara klien anak dan korban (diversi).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara yaitu dengan cara memaksimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan diversi baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan anak.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya. Di tahun 2022 jumlah anak yang terpenuhi hak pendidikannya sebanyak 92 orang, dengan jumlah klien anak sebanyak 126 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan}}{\text{Jumlah klien anak}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{92}{126} \times 100 \%$$

$$\% = 73\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{73\%}{30\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 243\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 243% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.52 Capaian Target dan Realisasi SK V dan IKK 3 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	73 %	243%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 30% sedangkan realisasinya adalah 73% sehingga capaian kinerjanya adalah 243%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 25% meningkat pada tahun 2022 sebesar 48% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK V dan IKK 3 tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	25%	100%	30 %	73%	243 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat kenaikan capaian dari 100% menjadi 243%, dikarenakan banyaknya klien anak yang melanjutkan pendidikan setelah bebas dari LPKA, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 25%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 30%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui.

Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya tahun 2022 sebesar 243% dengan realisasi sebesar 73%.

Tabel 3.54 Target Jangka Menengah SK V dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25 %	30 %	30%	30 %	73%	243 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dikarenakan banyaknya klien anak yang melanjutkan pendidikan setelah bebas dari LPKA.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya yaitu dengan cara melaksanakan pendidikan non formal dalam pembinaan kepribadian, kerohanian serta mendapat dukungan dari pengasuh anak didik.

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 4 (empat) Indikator Kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan bersertifikat”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase

anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat. Di tahun 2022 Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat sebanyak 15 orang, dengan jumlah klien anak sebanyak 24 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dan bersertifikat}}{\text{Jumlah Klien Anak}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{15}{24} \times 100 \%$$

$$\% = 62.5\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{62.5\%}{75\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 83\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 83% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.56 Capaian Target dan Realisasi IKK SK VI dan IKK 1 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	62,5 %	83%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat tidak mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70% sedangkan realisasinya adalah 62,5% sehingga capaian kinerjanya adalah 83%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021

sebesar 70% menurun pada tahun 2022 sebesar 7,5% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK 1
Tahun 2022 dan 2021**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	70%	100%	75 %	62,5%	83 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat penurunan capaian dari 100% menjadi 83%, dikarenakan anggaran untuk kegiatan pendidikan keterampilan di lakukan pergeseran BAMA oleh Ditjenpas, hal itu juga dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 75%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat tahun 2022 sebesar 83% dengan realisasi sebesar 62,5%.

Tabel 3.58 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70 %	75 %	75%	75 %	62,5%	83 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan

5. Penyebab Kegagalan

Pada indikator kegiatan ini tidak mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan anggaran untuk kegiatan pendidikan keterampilan di lakukan pergeseran BAMA oleh Ditjenpas.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat yaitu Pihak LPKA agar terus meningkatkan kerjasama dengan pihak lainnya terkait pendidikan keterampilan dan bersertifikat bagi anak didik.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase anak yang memperoleh hak integrasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase anak yang memperoleh hak integrasi. Di tahun 2022 Jumlah Anak yang di usulkan integrasi sebanyak 14 orang, dengan Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi sebanyak 14 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah anak yang mendapatkan program Reintegrasi Sosial}}{\text{Jumlah anak yang memenuhi syarat untuk diusulkan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{14}{14} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 100% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.59 CapaianTarget dan Realisasi SK VI dan IKK 2 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100 %	100%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase anak yang memperoleh hak integrasi telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 100% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase anak yang memperoleh hak integrasi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 100% sama rata pada tahun 2022 sebesar 100% dikarenakan terdapat persamaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.60 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK 2 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat persamaan capaian dari 100% menjadi 100%, dikarenakan adanya persamaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Target capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase anak yang memperoleh hak integrasi tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.61 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100 %	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase anak yang memperoleh hak integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan persentase anak yang memperoleh hak integrasi ini telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan dari seluruh jumlah anak didik yang telah diusulkan hak intergrasi nya telah mendapatkan hak integrasi mereka.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase anak yang memperoleh hak integrasi Divisi Pas melakukan supervisi secara berkala terkait pengsulan integrasi anak didik pemasyarakatan sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam pengsulan hak integrasi anak.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar. Di tahun 2022 Jumlah Anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar sebanyak 20 orang, dengan Jumlah total Anak sebanyak 23 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \% \\
 & = \frac{\text{Jumlah Anak yang mempperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar}}{\text{Jumlah Total Anak}} \times 100 \%
 \end{aligned}$$

$$\% = \frac{20}{23} \times 100 \%$$

$$\% = \%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{87\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$Capaian = 109\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 109% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.62 Capaian Target dan Realisasi SK VI dan IKK 3 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	87 %	109%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 87% sehingga capaian kinerjanya adalah 109%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 70% meningkat pada tahun 2022 sebesar 17% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK 3
Tahun 2022 dan 2021**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar	70%	70%	100%	80 %	87%	109 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 109%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar tahun 2022 sebesar 109% dengan realisasi sebesar 87%.

Tabel 3.64 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar	70%	80%	80%	80 %	87%	109%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada indikator kegiatan persentase anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar ini telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan semua

anak telah memperoleh hak pengasuhan yang baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar yaitu Divisi Pas melakukan supervisi secara berkala terkait pengasuhan bagi anak didik masyarakat di LPKA.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal. Di tahun 2022 Jumlah Anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal sebanyak 19 orang, dengan Jumlah total Anak sebanyak 23 orang. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal}}{\text{Jumlah total anak}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{19}{23} \times 100 \%$$

$$\% = 84\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{84\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 105\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 105% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.65 Capaian Target dan Realisasi SK VI dan IKK 4 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	84 %	105%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 84% sehingga capaian kinerjanya adalah 105%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 70% meningkat pada tahun 2022 sebesar 14% dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK 4 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	70%	100%	80 %	84%	105 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 105%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui.

Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal tahun 2022 sebesar 105% dengan realisasi sebesar 84%.

Tabel 3.67 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	80%	80%	80 %	84%	105%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal ini telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan semua anak telah mendapatkan pendidikan formal maupun non formal.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal yaitu Divisi LPKA untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait untuk pelaksanaan pendidikan formal dan non formal

SASARAN KEGIATAN 7		
Meningkatnya	Kualitas	Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di bidang Keamanan dan Ketertiban		

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 4 (empat) Indikator Kegiatan yaitu :

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase menurunnya tahanan yang overstaying”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pengaduan yang diselesaikan. Di tahun 2022 pada triwulan II dan III terdapat 2 pengaduan keamanan dan ketertiban yang ada di Lapas/Rutan, dengan 2 jumlah pengaduan keamanan ketertiban yang diselesaikan. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah pengaduan kamtib yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.68 Capaian Target dan Realisasi SK VII dan IKK 1 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100 %	125%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase pengaduan yang diselesaikan telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase

pengaduan yang diselesaikan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 75% meningkat pada tahun 2022 sebesar 25% dikarenakan semua pengaduan yang masuk telah diselesaikan dengan baik, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK 1
Tahun 2022 dan 2021**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	75%	75%	100%	80 %	100%	125 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 125%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 75%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase pengaduan yang diselesaikan tahun 2022 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.70 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase pengaduan yang diselesaikan	75%	80%	80%	80 %	100%	125%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase pengaduan yang diselesaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase pengaduan yang diselesaikan ini telah mencapai target yang ditentukan dikarenakan semua pengaduan kemanan dan ketertiban telah diselesaikan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pengaduan yang diselesaikan yaitu melakukan penyelesaian terhadap pengaduan Keamanan dan ketertiban yang masuk sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dengan aturan yang berlaku.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase pencegahan gangguan kamtib”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pengaduan yang diselesaikan. Di tahun 2022 pada triwulan ke III terdapat 10 orang pelaku gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di Lapas/Rutan, dari jumlah 10 orang gangguan keamanan dan ketertiban tersebut dapat diselesaikan dengan baik terhadap jumlah pelaku gangguan kamptib yang patuh dan disiplin. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah pelaku pengaduan kamtib yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelaku pengaduan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{10}{10} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{70\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 143\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 143%

sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.71 Capaian Target dan Realisasi SK VII dan IKK 2 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100 %	143%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase pencegahan gangguan kamtib telah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 143%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase pencegahan gangguan kamtib di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 60% meningkat pada tahun 2022 sebesar 40% dikarenakan semua gangguan kamtib dapat dicegah dengan baik, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK 2 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	60%	100%	70 %	100%	143 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 143%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 70%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui.

Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase pencegahan gangguan kamtib tahun 2022 sebesar 143% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.73 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase pencegahan gangguan kamtib	60%	70%	70%	70 %	100%	143%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase pencegahan gangguan kemanana dan ketertiban hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase pencegahan gangguan kamtib ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan semua gangguan kemanan dan ketertiban yang ada dapat dicegah dengan baik dan terkendali.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pencegahan gangguan kamtib yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas baik dari dalam maupun dari luar.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib. Di tahun 2022 pada triwulan ke III terdapat 10 orang tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan keamanan dan ketertiban yang mengulangi pelanggarannya yang ada di Lapas/Rutan, dari jumlah 10 orang pelaku gangguan keamanan dan ketertiban tersebut dapat diselesaikan dengan

baik terhadap jumlah pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran}}{\text{Jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{10}{10} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.74 Capaian Target dan Realisasi SK VII dan IKK 3 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100 %	125%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/anak pelaku gangguan kamtib telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 75% meningkat pada tahun 2022 sebesar

25% dikarenakan semua pelaku gangguan kamtib telah sadar dan patuh, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK 3
Tahun 2022 dan 2021**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	100%	80 %	100%	125 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 125%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 75%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib tahun 2022 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.76 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	80%	80 %	100%	125%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib

oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan semua pelaku gangguan kemanan dan ketertiban telah sadar dan patuh terhadap peraturan yang ada pada Lapas/Rutan/LPKA.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pencegahan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA benar-benar harus memberlakukan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah di buat oleh pelaku gangguan kemanan dan ketertiban sehingga ada efek jera bagi pelaku.

Sasaran Kegiatan 8
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 4 (empat) indikator kegiatan yaitu:

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar. Di tahun 2022 pada triwulan II dan III terdapat 2 jumlah pengaduan keamanan dan ketertiban, dari 2 jumlah pengaduan keamanan ketertiban tersebut telah ditindakjuti atau terselesaikan dengan baik. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pengaduan kamtib yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelaku pengaduan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$Capaian = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.77 Capaian Target dan Realisasi SK VIII dan IKK 1 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100 %	125%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Lapas/Rutan/LPKA tahun 2021 sebesar 75% meningkat pada tahun 2022 sebesar 25% dikarenakan semua pengaduan telah diselesaikan dengan baik, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

**Tabel 3.78 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK 1
Tahun 2022 dan 2021**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	100%	80 %	100%	125 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 125%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 75%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2022 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.79 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	80%	80 %	100%	125%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan semua pengaduan telah diselesaikan dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar yaitu yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA berupaya memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban, pemulihan itu berupa cipta kondisi, yang dimaksud dengan “cipta kondisi” adalah pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban, seperti pemulihan kesehatan fisik dan psikologis Petugas Pemasarakatan, Tahanan dan Narapidana, pemulihan lingkungan fisik seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas, serta perbaikan prosedur kerja.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. Di tahun 2022 pada triwulan III terdapat 10 jumlah pelaku gangguan keamanan dan ketertiban, dari 10 jumlah pelaku gangguan keamanan ketertiban tersebut terdapat 10 jumlah pelaku gangguan keamanan ketertiban yang patuh dan disiplin telah terselesaikan dengan baik. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pengaduan kamtib yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{10}{10} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{70\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 143\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 143% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.80 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK 2 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100 %	143%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 143%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Lapas/Rutan/LPKA tahun 2021 sebesar 60% meningkat pada tahun 2022 sebesar 40% dikarenakan semua gangguan kamtib dapat dicegah dengan baik, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.90 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK 2 tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	100%	70 %	100%	143 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 143%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 70%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 143% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.91 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	70%	70 %	100%	143%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan semua gangguan keamanan ketertiban yang ada di Lapas/Rutan/LPKA dapat dicegah dengan baik dan terkendali.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA berupaya memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban, pemulihan itu berupa cipta kondisi, yang dimaksud dengan “ciptakondisi” adalah pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban, seperti pemulihan kesehatan fisik dan psikologis Petugas Pemasyarakatan, Tahanan dan Narapidana, pemulihan lingkungan fisik seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas, serta perbaikan prosedur kerja.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib. Di tahun 2022 pada triwulan III terdapat 10 jumlah pelaku gangguan keamanan dan ketertiban, dari 10 jumlah pelaku gangguan keamanan ketertiban tersebut terdapat 10 jumlah pelaku gangguan keamanan

ketertiban yang patuh dan disiplin mengulangi pelanggarannya telah terselesaikan dengan baik. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\text{jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{10}{10} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 125% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.92 Capaian Target dan Realisasi SK VIII dan IKK 3 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100 %	125%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Lapas/Rutan/LPKA tahun 2021

sebesar 75% meningkat pada tahun 2022 sebesar 25% dikarenakan semua pelaku gangguan kamtib telah sadar dan patuh, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.93 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK 3 tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%	75%	100%	80 %	100%	125 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 125%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 75%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib tahun 2022 sebesar 125% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.94 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	80%	80 %	100%	125%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan

kamtib.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib ini telah melebihi target yang ditentukan dikarenakan semua pelaku gangguan keamanan ketertiban yang ada pada Lapas/Rutan/LPKA telah sadar dan patuh.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA berupaya memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban, pemulihan itu berupa cipta kondisi, yang dimaksud dengan “ciptakondisi” adalah pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban, seperti pemulihan kesehatan fisik dan psikologis Petugas Pemasyarakatan, Tahanan dan Narapidana, pemulihan lingkungan fisik seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas, serta perbaikan prosedur kerja.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas. Di tahun 2022 pada triwulan III terdapat 10 jumlah gangguan keamanan dan ketertiban, dari 10 jumlah gangguan keamanan ketertiban tersebut terdapat 10 jumlah pemulihan kondisi gangguan keamanan ketertiban telah terselesaikan secara tuntas dan baik. Berdasarkan data diatas maka dari indikator tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{10}{10} \times 100 \%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase diatas maka dapat dihitung

capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{70\%} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 143\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 143% sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.95 Capaian Target dan Realisasi SK VIII dan IKK 4 tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100 %	143%

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa target persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebesar 70% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 143%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Lapas/Rutan/LPKA tahun 2021 sebesar 60% meningkat pada tahun 2022 sebesar 40% dikarenakan pemulihan kondisi keamanan cepat dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan/LPKA, hal itu juga dikarenakan terdapat perbedaan target pada tahun 2021.

Tabel 3.96 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VIII dan IKK 4 tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	60%	100%	70 %	100%	143 %

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, terdapat peningkatan capaian dari 100% menjadi 143%, dikarenakan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 60%, sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 70%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Capaian kinerja untuk Indikator realisasi persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2022 sebesar 143% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel 3.97 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	70%	70 %	100%	143%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini pengukuran terhadap persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Adanya peningkatan dalam realisasi maupun capaian kinerjanya pada indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas ini telah mencapai serta melebihi target yang ditentukan dikarenakan pemulihan kondisi keamanan ketertiban yang ada cepat dilakukan atau ditanggapi oleh pihak Lapas/Rutan/LPKA.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang peningkatan keberhasilan persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yaitu pihak Lapas/Rutan dan LPKA berupaya memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban, pemulihan itu berupa cipta

kondisi, yang dimaksud dengan “cipta kondisi” adalah pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban, seperti pemulihan kesehatan fisik dan psikologis Petugas Pemasyarakatan, Tahanan dan Narapidana, pemulihan lingkungan fisik seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas, serta perbaikan prosedur kerja.

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Keimigrasian dilaksanakan melalui aplikasi survei secara *real time* oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM selama tahun 2022 melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id> dengan berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilakukan secara periodik dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Pengguna layanan keimigrasian yang menjadi responden salam survei kepuasan masyarakat tahun 2022 sebanyak 820 responden yang terdiri dari 2 Unit Pelaksana Teknis di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang : 397 Responden
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan : 423 Responden

Tabel 3.98 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada satuan kerja Imigrasi di wilayah Bangka Belitung

Nama Satker	Indeks Kepuasan Masyarakat	
	Nilai	Responden
Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung	3,99	820
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	4,00	423
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	3,99	397

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Tahun 2022 dilakukan perhitungan atas penggabungan indeks dari masing-masing Kantor Imigrasi di wilayah provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Tahun 2022 adalah target 3,99 yang didapat dari nilai rerata indeks kepuasan masyarakat dari seluruh Kantor Imigrasi .

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanankeimigrasian pada setiap bulan. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan oleh setiap pemohon dengan cara mengakses QR Code online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut beberapa unsur layanan/variabel yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat, yaitu:

- Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
- Persyaratan : Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan;
- Prosedur/alur : Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan;
- Waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini;
- Tarif/biaya : Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini

sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;

- Sarana prasarana : Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
- Respon : Tugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
- Konsultasi dan pengaduan : Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.
- Responden : Seseorang yang menjawab pertanyaan/kuesioner yang diajukan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,99}{3,20} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 124,68\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2022 dengan target 3,20 indeks telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,20 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,99 indeks sehingga persentase capaian kinerja reratanya adalah 124,68%.

Tabel. 3.99 Capaian Target dan Realisasi SK IX dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20	3,99	124,68 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah tahun 2021 sebesar 3,93 indeks meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,99 indeks.

**Tabel. 3.100 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK IX dan IKK 1
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks	3,93 Indeks	124,76 %	3,20 Indeks	3,99 Indeks	124,68 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah tahun 2023 adalah 3,25 indeks sementara target di tahun 2024 adalah 3,30 indeks. Realisasi di TA 2021 adalah 3,93 indeks sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 3,99 indeks.

Tabel 3.101 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks	3,15 Indeks	3,20 Indeks	3,25 Indeks	3,30 Indeks

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pencapaian hasil survei tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik pada Kantor Imigrasi yaitu Layanan Paspor, Layanan Izin Tinggal, Layanan Eazy Passport, Layanan Paspor simpatik serta pelayanan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Terlampauinya nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2022 disebabkan karena Peluncuran aplikasi M-Paspor, Penerapan masa berlaku paspor 10 tahun, Percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online, Percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online, Peluncuran program layanan Eazy Passport, inovasi terkait layanan keimigrasian yang dibuat oleh kantor Imigrasi di wilayah Bangka Belitung, Optimalnya penyebaran informasi melalui banner, media sosial, website, cetak, dan elektronik terkait pelayanan keimigrasian serta respon terhadap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2022 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 14 November 2022 hingga 09 Desember 2022 dengan jumlah 51 responden yang terdiri dari :

- a. Divisi Keimigrasian : 12 Responden
- b. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang : 17 Responden
- c. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan : 22 Responden

Survei capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada tahun 2022 dilakukan

pengembangan terhadap unsur, pertanyaan, bobot serta responden. Responden pada Satuan Kerja Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Berikut hasil capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Nilai IPK di wilayah didapat dari menghitung seluruh rerata nilai IPK Satuan kerja Kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian :

Tabel. 3.102 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di wilayah Bangka

Nama Satker	Indeks Pengamanan Keimigrasian	
	Responden	NILAI IPK
Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung	12	3,87
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	22	3,90
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	17	3,79
JUMLAH	51	3.85

$$\% = \frac{\text{Realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{3,95}{3,12} \times 100 \%$$

$$\% = 123,39\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,12 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,85 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 123,39%.

Tabel 3.103 Capaian Target dan Realisasi SK IX dan IKK 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,12	3,85	123,39 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2021 sebesar 3,91 indeks menurun pada tahun 2022 sebesar 3,85 indeks, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 3,12 indeks sehingga capaiannya sebesar 123,39%. Namun dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana nilai Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian sebesar 3,91 , pada Tahun 2022 capaian IPK sebesar 3,85 atau turun sebesar 0.06. Hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya pengembangan instrumen survei yang dilakukan, antara lain:

1. Cakupan responden pada survei Indeks Pengamanan Keimigrasian diperluas. Survei IPK tahun 2021 hanya diikuti pejabat struktural di satuan kerja, sedangkan untuk tahun 2022 Survei IPK diikuti oleh pejabat struktural dan pegawai serta khusus untuk Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melibatkan responden pihak eksternal yaitu, Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).
2. Penambahan dan pembagian unsur untuk masing-masing jenis satuan kerja imigrasi. Pada tahun 2021 unsur dan pertanyaan untuk Divisi Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sama, sedangkan pada tahun 2022 unsur dan pertanyaan masing-masing jenis satuan kerja dibedakan, sehingga responden dapat mengisi survei lebih sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Privasi responden pada survei tahun 2022 lebih terjaga. Hal ini dikarenakan responden tidak perlu mengisi data identitas sebagaimana pada survei tahun 2021 dimana responden harus login dan mengisi data diri seperti Nama, NIP, Email dan seterusnya. Dengan demikian, responden dapat mengisi survei dengan lebih leluasa dan sesuai dengan kondisi riil.

**Tabel 3.104 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK IX dan IKK 2
Tahun 2021 dan 2022**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,91 Indeks	125,74 %	3,12 Indeks	3,85 Indeks	123,39 %

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 adalah 3,13 indeks sementara target di tahun 2024 adalah 3,14 indeks. Realisasi di TA 2021 adalah 3,91 indeks sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 3,85 indeks.

Tabel 3.105 Target Jangka Menengah SK IX dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,11 Indeks	3,12 Indeks	3,13 Indeks	3,14 Indeks

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena Indeks Pengamanan Keimigrasian hanya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun untuk satuan kerja imigrasi dapat mengacu nilai capaian indeks pengamanan keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai standar

nasional. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- a. Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di semua Kantor Imigrasi dan Divisi Keimigrasian Bangka Belitung ;
- b. Terjalannya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan aplikasi Nyidakim (Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
- d. Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik;
- e. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Diantara banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung Pengamanan Keimigrasian, 2 program berikut dianggap menjadi faktor penunjang yang paling signifikan, yaitu:

1. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut TIMPORA adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Pembentukan TIMPORA dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Adapun fungsi TimPORA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing antara lain sebagai-

berikut :

- a) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
- b) Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dan tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
- c) Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- d) Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta Kerjasama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- e) Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua TIMPORA berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Dengan pembentukan TIMPORA dimasing-masing tingkat wilayah dinilai sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pengawasan orang asing dalam konteks pengamanan di bidang keimigrasian.

2. Cekal online

Penerapan Aplikasi Cekal Online didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan. Pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Aplikasi Cegah dan Tangkal (Cekal) dengan sistem Online merupakan terobosan baru di Tahun 2022 yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal Pencekalan yang dibuat secara online. Aplikasi Cekal Online terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Teknologi *Elastic Search*, yaitu pencarian/pencocokan identitas akan dimasukkan ke dalam logika aplikasi Visa Online untuk melihat data perlintasan yang bersangkutan. Selain itu, terdapat teknologi *Matching By Biometric* guna meminimalisasi pemalsuan data. Dengan adanya Aplikasi Cekal Online, petugas di satuan kerja tidak

perlu lagi melayangkan surat ke Direktorat Wasdakim guna mengajukan permohonan cegah/tangkal. Petugas yang ditunjuk disiapkan profil masing-masing agar dapat menginput data ke Aplikasi Cekal Online, begitu pula petugas verifikator.

SASARAN KEGIATAN 10

Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian Hukum

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah dengan target 5%.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum di wilayah. Bahwa berdasarkan data penerimaan PNBP pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebesar Rp. 1.492.600.000,- sedangkan untuk Tahun 2021 penerimaan PNBP sebesar 1.334.550.000,- Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Penerimaan tahun 2022} - \text{Jumlah Penerimaan tahun 2021}}{\text{Jumlah Penerimaan tahun 2021}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{1.493.600.000 - 1.334.550.000}{1.334.550.000} \times 100 \%$$

$$\% = 0.12 \times 100 \%$$

$$\% = 12 \%$$

Berdasarkan konversi dengan rumus di atas diperoleh Nilai Presentase Peningkatan Jumlah PNBP sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{12}{5} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 240 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 sebesar 240 %, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.106 Capaian Target dan Realisasi SK X dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5 %	12 %	240 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun 2021 sebesar 4 % dan pada tahun 2022 meningkat yaitu 12 %.

Tabel 3.107 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK X dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5 %	4 %	80 %	5 %	12 %	240 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terdapat kenaikan realisasi dan capaian kinerja IKK tahun 2022 sebesar 12 % dari target yang ditetapkan sebesar 5 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun 2022 sebesar 5 % sementara realisasi capaian tahun 2022 adalah 12 %

Tabel 3.108 Target Jangka Menengah SK X dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5 %	5 %	5 %	5 %	12%	240 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Telah dilakukan kerja sama dan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama untuk dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan peduli akan pentingnya legalitas usaha seperti pendaftaran Perseroan Terbatas, Badan Hukum serta layanan administrasi hukum lainnya. Mengoptimalkan pelayanan publik berbasis elektronik dengan layanan pengelolaan pengaduan ataupun konsultasi, sehingga masyarakat yang memiliki pertanyaan, keluhan, ataupun pengaduan terkait layanan AHU dapat direspon dengan baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta seminar terkait layanan administrasi hukum umum di wilayah, informasi mengenai pentingnya legalitas dalam pendirian usaha serta pendirian badan hukum di wilayah dapat terus meningkat, sehingga akan berimplikasi pada meningkatnya PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SASARAN KEGIATAN 11

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah dengan target 84%.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait dengan Dugaan Pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum di wilayah salah satunya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi majelis dalam upaya pembinaan terhadap tugas dan fungsi Notaris. Bahwa berdasarkan data Tahun 2022 terdapat 4 pengaduan yang masuk kepada MKNW, MPW dan MPD yang telah ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\% = \frac{\text{Jumlah laporan pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan yang masuk}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{4}{4} \times 100 \%$$

$$\% = 1 \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai presentase penyelesaian permohonan masyarakat sebesar 100 % sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{84} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 119 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 sebesar 119 %, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.109 Capaian Target dan Realisasi SK XI dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah.	84 %	100 %	119 %

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 84% sedangkan realisasinya adalah 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah 119 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah tahun 2021 sebesar 82 % dan pada tahun 2022 meningkat yaitu 100 %.

Tabel 3.110 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XI dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah.	82 %	82 %	100 %	84 %	100 %	119 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terdapat kenaikan realisasi dan capaian kinerja IKK tahun 2022 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 84 %, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 82 % dari target ditetapkan sebesar 82 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah tahun 2022 sebesar 84 % sementara realisasi adalah 100 % dengan capaian IKK 119 %.

Tabel 3.111 Target Jangka Menengah SK XI dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah.	82 %	84 %	86 %	88 %	100 %	119 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Membangun sinergitas atau komitmen antar pegawai dan *stakeholder* lainnya dalam mendukung pelaksanaan penyusunan kegiatan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah dalam hal ini Sub Bidang AHU. Serta melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris secara daring maupun secara tatap muka.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta seminar terkait

pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah, diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dapat bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah. Sehingga segala bentuk pelanggaran dapat diminimalisir.

SASARAN KEGIATAN 12

Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah dengan target 17 Permohonan dan Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah dengan target 1 Lokus .

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Bahwa berdasarkan data Tahun 2022 terdapat 43 permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah dengan target sebanyak 17 permohonan. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Permohonan KI}}{\text{Target Permohonan KI}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{43}{17} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 2.52 \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 252 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai presentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sebesar 252 %. Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 sebesar 252 %, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.112 Capaian Target dan Realisasi SK XII dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	17 Permohonan	43 Permohonan	252 %

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 17 permohonan sedangkan realisasinya adalah 43 permohonan sehingga capaian kinerjanya adalah 252 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 sebesar 34 permohonan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 43 permohonan.

Tabel 3.113 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XII dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	16 permohonan	34 permohonan	212 %	17 permohonan	43 permohonan	252 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terdapat kenaikan capaian kinerja IKK tahun 2021 sebesar 212 %, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 252 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 sebesar 15 permohonan sementara realisasi capaian tahun 2022 adalah 43 permohonan dengan capaian 286 %.

Tabel 3.114 Target Jangka Menengah SK XII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Permohonan)				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	15	15	15	15	43 permohonan	286 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Proses pengajuan permohonan yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna melakukan permohonan kekayaan intelektual dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang langsung ke Kantor Wilayah yang berada di wilayah pemohon. Petugas Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang profesional dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang baik datang langsung ke Kantor Wilayah ataupun yang melalui *Call Center* mengenai tata cara pendaftaran mandiri secara online tersebut, sehingga masyarakat dapat langsung memahami prosedur yang berlaku.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaanya

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi dan promosi dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Bahwa berdasarkan data Tahun 2022 Kantor Wilayah telah menyelenggarakan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi, Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual bertempat di Sungailiat (Hotel Novillah, pada tanggal 8 Maret 2022;
- 2) Promosi dan Diseminasi Hak Cipta bertempat di Toboali (Marina Hotel) pada 29 Maret 2022;
- 3) Promosi dan Diseminasi Hak Cipta di Muntok (Pasadena Hotel) pada 7 Juni 2022;
- 4) Sosialisasi Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Tanjung Pandan (Hotel BW Suit) pada tanggal 22 Juni 2022.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi}}{\text{Target Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{4}{1} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 4 \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 400 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai presentase

jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah sebesar 400%. Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2022 sebesar 200 %, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.115 Capaian Target dan Realisasi SK XII dan IKK 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	4 lokus	400 %

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 1 lokus sedangkan realisasinya adalah 4 lokus sehingga capaian kinerjanya adalah 400 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tahun 2021 sebanyak 3 lokus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4 lokus.

Tabel 3.116 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XII dan IKK 2 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 lokus	3 lokus	300 %	1 lokus	4 lokus	400 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas terdapat kenaikan capaian kinerja IKK tahun 2021 sebesar 300 %, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 400 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target kinerja untuk indikator jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tahun 2022 sebanyak 2 lokus.

Tabel 3.117 Target Jangka Menengah SK XII dan IKK 2

Indikator Kegiatan	Kinerja	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
		2021	2022	2023	2024		
Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah		1 lokus	1 lokus	1 lokus	1 lokus	4 lokus	400 %

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan melalui rumus di atas, realisasi jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah berdasarkan target RPJMN mencapai 400 %.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Selain melalui kegiatan diseminasi dan promosi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial dalam hal penyebaran informasi terkait layanan Kekayaan Intelektual yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih mempercepat penyebarluasan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kantor Wilayah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengajak masyarakat serta pelaku usaha baik itu Usaha Kecil Mikro atau Industri Kecil Mikro sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual bagi masyarakat dan pelaku.

SASARAN KEGIATAN 13

Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah dengan target 17 Permohonan dan Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah dengan target 1 Lokus .

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual. Bahwa berdasarkan data Tahun 2022 tidak ada pengaduan mengenai pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk ke Kantor Wilayah, sehingga pembinaan terhadap Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Babel sudah baik. Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 adalah NIHIL. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.118 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100 %	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 100 %, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 tidak ada pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah (NIHIL).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tahun 2021 terdapat 1 (satu) aduan yang telah ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada pengaduan (nihil) pelanggaran Kekayaan Intelektual.

**Tabel 3.119 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK
Tahun 2022 dan 2021**

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100 %	100 %	100 %	100 %	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 100 %, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 tidak ada pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah (NIHIL).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2022 yaitu NIHIL.

Tabel 3.120 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Permohonan)				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100 %	100 %	100 %	100 %	NIHIL	NIHIL

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 100 %, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 tidak ada pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah (NIHIL).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual

di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Kerja Sama Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual di Tanjung Pandan pada tanggal 11 Agustus 2022; dan
- 2) Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2022 di Pangkajene pada tanggal 4 Oktober 2022.

Bahwa berdasarkan data Tahun 2022 terdapat 2 (dua) pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran KI}}{\text{Target Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran KI}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{2}{2} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 diperoleh sebesar 100 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.121 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus	2 lokus	100 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tahun 2021 terdapat 1 (satu) penyelenggaraan pencegahan Kekayaan Intelektual, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) penyelenggaraan pencegahan Kekayaan Intelektual di Wilayah.

**Tabel 3.122 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK SK XIII dan IKK 2
Tahun 2022 dan 2021**

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	2 lokus	2 lokus	100 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 100 % dengan target 1 (satu) kegiatan, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 sebesar 100 % dengan target 2 lokus kegiatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian IKK Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah pada tahun 2022 yaitu 100 %.

Tabel 3.123 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 lokus	2 lokus	2 lokus	2 lokus	2 lokus	100 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah bekerja sama dengan berbagai pihak/stakeholder dalam upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan kegiatan kerja sama Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual di Tanjung Pandan pada tanggal 11 Agustus 2022; Bahwa berdasarkan data Tahun 2022 terdapat 1 (satu) pelaksanaan pemantauan produk Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk KI}}{\text{Target Kegiatan Pemantauan Produk KI}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 diperoleh sebesar 100 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.124 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 3 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 laporan	1 laporan	100 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah tahun 2021 tercapai 1 (satu) laporan, sedangkan pada tahun 2022 tercapai 1 (satu) penyelenggaraan pencegahan Kekayaan Intelektual di Wilayah.

Tabel 3.125 perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 3 Tahun 2022 dan 2021

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 1 (satu) laporan, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 sebesar 100 % dengan realisasi 1 laporan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian IKK Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah pada tahun 2022 yaitu 100 %.

Tabel 3.126 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Koordinasi yang terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

SASARAN KEGIATAN 14

Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah melalui Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mengemban tugas dan fungsi tersebut. Pencapaian indikator kinerja yang digunakan yaitu Presentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan jumlah permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi Raperda/Raperkada dan permohonan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda yang masuk ke Kantor Wilayah sebanyak 61 (enam puluh satu). Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Perancangan Raperkada}}{\text{Jumlah Permohonan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{61}{61} \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125 \%$$

Tabel 3. 127 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIV dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80 %	100 %	125 %

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Presentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80 % sedangkan realisasinya adalah 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah 125 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 260 % menurun pada tahun 2022 sebesar 125 % dikarenakan terdapat perbedaan target pada Tahun 2021.

Tabel 3.128 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIV dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	10 Raperda	26 Raperda	260 %	80 %	100 %	125 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terdapat penurunan capaian dari 260 % menjadi 125 %, hal itu disebabkan dengan perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sejumlah 10 Raperda, sedangkan pada tahun 2022 target ditetapkan menggunakan ukuran presentase permohonan Raperda/Raperkada yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator presentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah pada tahun 2022 sebesar 125 % dengan realisasi 100 %.

Tabel 3.129 Target Jangka Menengah SK XIV dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	125 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Terjalinya sinergi dan kerja sama yang meningkat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain hal tersebut, dukungan regulasi yang memang memerintahkan langsung bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dengan meningkatnya permohonan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah, tentunya Kantor Wilayah juga harus didukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten, sehingga melalui program bimbingan teknis bagi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, SDM pada Kantor Wilayah dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya.

SASARAN KEGIATAN 15

**Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan**

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Sehingga tenaga perancang

perundang-undangan perlu mendapatkan pembinaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah hukum. Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perancang yang mengikuti Pembinaan}}{\text{Target Perancang yang mengikuti Pembinaan}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{30}{16} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 187 \%$$

Berdasarkan hasil penghitungan persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.130 Capaian Target dan Realisasi SK XV dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 orang	30 orang	187 %

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Tahun 2022 telah tercapai. Target yang ditetapkan adalah 16 orang sedangkan realisasinya adalah 30 orang sehingga IKK Tahun 2022 adalah 187 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan tahun 2021 sebesar 187 % (30 orang) dan pada tahun 2022 sama yaitu 187 % (30 orang).

**Tabel 3.131 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK 1
Tahun 2022 dan 2021**

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 orang	30 orang	187 %	16 orang	30 orang	187 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas tidak ada kenaikan ataupun penurunan capaian kinerja IKK baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2021 dan 2022 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2021 sebanyak 16 orang dan tahun 2022 sebanyak 16 orang, sementara realisasi capaian pada tahun anggaran 2021 adalah 187 % dan tahun 2022 adalah 187 %.

Tabel 3.132 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	30 orang	187 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di

daerah yang mendapatkan pembinaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Bahwa kesadaran akan perkembangan hukum yang semakin dinamis sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas perancang perundang-undangan melalui kegiatan pembinaan yang dimaksud. Kemudian sikap kooperatif yang dimiliki oleh seluruh JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas/kemampuan diri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan sosialisasi serta seminar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui *daring*, para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di daerah dapat ikut andil dalam peningkatan kapasitas diri serta pengetahuan mengingat begitu dinamisnya perkembangan hukum yang ada di masyarakat.

SASARAN KEGIATAN 16

Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pemerintah Daerah untuk melaksanakan program aksi HAM melalui koordinasi ke Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa berdasarkan pemantauan pada aplikasi laporan capaian, Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan upload ke dalam situs serambi.ksp.go.id. sebanyak 8 (delapan) instansi pemerintah dengan

rincian Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$Capain = \frac{\text{Jumlah Pemda yang melaksanakan program Aksi HAM}}{\text{Target Pemda yang melaksanakan program Aksi HAM}} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{8}{2} \times 100 \%$$

$$Capaian = 400 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 400 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.133 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	8 Instansi Pemerintah	400 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) instansi pemerintah yang melaksanakan program aksi HAM, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 8 (delapan) instansi pemerintah.

Tabel 3.134 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 instansi	7 instansi	350 %	2 instansi	8 instansi	400 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah

350 % dengan realisasi 7 (tujuh) instansi pemerintah, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 sebesar 400 % dengan realisasi 8 (delapan) instansi pemerintah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 160 % dengan realisasi 8 instansi pemerintah yang melaksanakan program aksi HAM.

Tabel 3.135 Target Jangka SK XVI dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	8 instansi pemerintah	160 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi terkait HAM guna tetap mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian aksi HAM dalam hal ini Kantor Wilayah juga selalu melakukan komunikasi melalui surat notifikasi guna mengingatkan tenggang waktu pengumpulan data dukung terkait capaian aksi HAM dan melaksanakan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya terkait pelaksanaan program aksi HAM oleh masing-masing instansi pemerintah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap instansi pemerintah daerah yang sebelumnya telah melaksanakan program aksi HAM agar untuk Tahun selanjutnya dapat meningkatkan atau berpartisipasi sebagai instansi pemerintah yang ikut serta dalam program aksi HAM.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pemerintah Daerah untuk melaksanakan program aksi HAM melalui koordinasi ke Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-ha.02.01.335 tanggal 8 Desember 2022 perihal Notifikasi Lanjutan tentang Surat Keputusan Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021. Instansi pemerintah yang mendapat predikat Kabupaten/Kota peduli HAM adalah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Capain} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota Peduli HAM}}{\text{Target Kabupaten Kota Peduli HAM}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{2}{1} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 200 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 200 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.136 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, bahwa pelaksanaan Kabupaten Kota peduli HAM tahun 2021 ditiadakan oleh Direktorat Jenderal HAM, sedangkan capaian kinerja IKK tahun 2022 sebesar 200 % dengan realisasi 2 (dua) instansi pemerintah.

Tabel 3.137 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM	1 instansi	-	-	1 instansi	2 instansi	200 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas untuk capaian IKK Tahun 2022 sebesar 200 % dengan realisasi 2 (dua) instansi pemerintah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 160 % dengan realisasi 8 instansi pemerintah yang melaksanakan program aksi HAM.

Tabel 3.138 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM	1 instansi	1 instansi	1 instansi	1 instansi	2 instansi	200 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota dalam pemenuhan formula indikator kabupaten/kota peduli HAM serta terkait keabsahan seluruh data dukung yang digunakan selama proses penilaian kabupaten/kota peduli HAM; serta kesadaran masing-masing pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan perlindungan HAM sehingga dapat memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap instansi pemerintah daerah yang sebelumnya telah melaksanakan program aksi HAM agar untuk Tahun selanjutnya dapat meningkatkan atau berpartisipasi sebagai instansi pemerintah yang ikut serta dalam program aksi HAM.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM. Namun pada tahun 2022 melalui Rapat Koordinasi pada tanggal 24 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HAM.1-HA.03.02-05 tanggal 22 Maret 2022 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dimana menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa tahun 2022 tidak akan melaksanakan penilaian pelayanan publik berbasis HAM. Dengan demikian realisasi maupun capaian dari indikator yang dimaksud untuk tahun 2022 tidak dapat dilakukan penghitungan.

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.139 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 3 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	-	-

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, bahwa pelaksanaan Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM tahun 2021 dengan capaian 1000 % dengan realisasi 10 instansi pemerintah, sedangkan tahun 2022 pelaksanaan penilaian pelayanan publik berbasis HAM tidak dilaksanakan.

Tabel 3.140 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 3 Tahun 2022 dan 2021

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi	10 instansi	1000 %	1 instansi	-	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Bahwa karena pelaksanaan penilaian pelayanan publik berbasis HAM tahun 2022 tidak dilaksanakan, maka perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMN tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3.141 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi	1 instansi	1 instansi	1 instansi	-	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil

diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Walaupun pada tahun 2022 pelaksanaan penilaian pelayanan publik berbasis HAM ditiadakan, namun Kantor Wilayah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tetap melakukan sosialisasi mengenai klasifikasi jenis data dukung yang ada nantinya menjadi maksimal. Melaksanakan rapat evaluasi guna mengetahui kekurangan yang menyebabkan gagalnya UPT dalam memperoleh predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap UPT yang ada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan indikator pelayanan publik berbasis HAM terpenuhi dengan baik.

SASARAN KEGIATAN 17

Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima 3 (tiga) pengaduan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pengaduan warga Toboali melalui surat yang ditujukan ke Ditjen HAM, yang lokus permasalahannya berada di Kabupaten Bangka Selatan (koordinasi/klarifikasi ke Kejari Bangka Selatan pada 25 Oktober 2022)

- 2) Pengaduan dari Penyampai Komunikasi warga Sungailiat (Kabupaten Bangka) terkait dugaan adanya intimidasi pada saat proses BAP oleh Penyidik Polres Bangka terhadap orangtuanya (koordinasi/klarifikasi ke Polres Bangka pada 26 Oktober 2022);
- 3) Pengaduan dari Penyampai Komunikasi warga Kelurahan Pasir Putih (Kota Pangkalpinang) terkait oknum yang sering memanfaatkan identitas dirinya yang merupakan tunanetra dalam pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) (rapat koordinasi/klarifikasi dilaksanakan pada 8 November 2022).

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{3}{3} \times 100 \%$$

$$Capaian = 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 100 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.142 Capaian Target dan Realisasi SK XVII dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah tahun 2021 mencapai 3 (tiga) rekomendasi, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 3 (tiga) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah.

Tabel 3.143 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVII dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100 %	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100 %
---	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 3 (tiga) rekomendasi, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 sebesar 100 % dengan realisasi 3 (tiga) rekomendasi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi 3 rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah.

Tabel 3.144 Target Jangka Menengah SK XVII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (rekomendasi)				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3	3	3	3	3 rekomendasi	100 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kecepatan dan ketepatan Kantor Wilayah dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui aplikasi SIMASHAM, sehingga pengaduan segera dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang telah membentuk Pos Yankomas di setiap Kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga

akan mempermudah akses masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dialami.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terhadap para operator Pos Yankomas yang ada di kecamatan-kecamatan.

SASARAN KEGIATAN 18
Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan Produk Hukum Daerah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan rangka fasilitasi program pembentukan peraturan hukum daerah ke 7 Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- 2) Peningkatan Pemahaman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah pada Kamis, 4 Agustus 2022;
- 3) FGD Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan Tema Status Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang dilaksanakan pada Rabu, 27 Juli 2022;

Dengan demikian untuk memperoleh presentase jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Jumlah\ Kegiatan}{Target\ Kegiatan} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3}{2} \times 100\%$$

$$Capaian = 150\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 150 %.

Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.145 Capaian Target dan Realisasi SK XVIII dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	3 kegiatan	150 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 350 % dengan realisasi 7 kegiatan, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 sebesar 150 % dengan realisasi 3 kegiatan.

Tabel 3.146 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVIII dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	7 kegiatan	350 %	2 kegiatan	3 kegiatan	150 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 150 %

dengan realisasi 3 kegiatan.

Tabel 3.147 Target Jangka Menengah SK XVIII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	150 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik, Program Pembentukan Peraturan Daerah serta Analisis dan Evaluasi Hukum di wilayah;
- Sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan JF Perancang Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaksana Fasilitasi Naskah Akademik, Analisa serta Evaluasi Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pedoman analisis dan evaluasi hukum secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN KEGIATAN 19

Meningkatnya Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggandeng 8 (delapan) OBH untuk memberikan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

- 1) PDKP Babel;
- 2) Hatami Koniah;
- 3) LPH dan HAM Pancasila;
- 4) LBH Al-Hakim Babel;
- 5) LBH KUBI;
- 6) Milineal Bangka Tengah Keadilan (MBK);
- 7) LKBH Belitung;
- 8) LBH Lentera Serumpun Sebalai;

Total terdapat 105 permohonan yang telah dilakukan *reimbursement* pada permohonan Bantuan Hukum Litigasi. Sehingga pada sepanjang tahun 2022 telah ada 105 orang masyarakat miskin yang telah mendapatkan layanan Bantuan Hukum oleh PBH.

Dengan demikian untuk memperoleh presentase capaian kinerja IKK Tahun 2022 dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan litigasi}}{\text{Seluruh permohonan bantuan hukum litigasi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{105}{105} \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Berdasarkan hasil presentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Relaisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{81} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 123 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 123 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.148 Capaian Target dan Realisasi SK XIX dan IKK 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81 %	100 %	123 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2021 mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 123 %.

Tabel 3.149 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIX dan IKK 1 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77 %	77 %	100 %	81 %	100 %	123 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian kinerja IKK tahun 2021 adalah 100 % dengan realisasi 77%, sedangkan untuk capaian IKK Tahun 2022 sebesar 123 % dengan realisasi 100 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 123 %

Tabel 3.150 Target Jangka Menengah SK XIX dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77 %	81 %	81 %	81 %	100 %	123 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan menggandeng OBH untuk menyebarluaskan pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggandeng 8 (delapan) OBH untuk

memberikan bantuan hukum non-litigasi kepada masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dalam bentuk :

- 1) Investigasi Kasus sebanyak 1 permohonan;
- 2) Konsultasi Hukum sebanyak 1 permohonan;
- 3) Mediasi sebanyak 6 permohonan;
- 4) Negosiasi sebanyak 2 permohonan;
- 5) Pendampingan di luar Pengadilan sebanyak 5 permohonan;
- 6) Penyuluhan Hukum sebanyak 26 Permohonan.

Terdapat total 41 permohonan layanan Bantuan Non-Litigasi yang telah dilaksanakan oleh OBH dimana sesuai dengan pedoman yang ada. Khusus untuk Bantuan Non-Litigasi terdapat penyesuaian besaran anggaran yang diberikan untuk mengakomodir kegiatan agar lebih maksimal berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-litigasi.

Dengan demikian untuk memperoleh presentase capaian kinerja IKK Tahun 2022 dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan non litigasi}}{\text{Seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{41}{41} \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Berdasarkan hasil presentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Relaisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 125 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.151 Capaian Target dan Realisasi SK XIX dan IKK 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	100 %	125 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2021 mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 125 %.

Tabel 3.152 perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIX dan IKK 2 Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79 %	79%	100 %	80 %	100 %	125 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 125 % dengan realisasi 100 %.

Tabel 3.153 Target Jangka Menengah SK XIX dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase permohonan bantuan hukum non	79 %	80 %	80 %	80 %	100 %	125 %

litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan						
---	--	--	--	--	--	--

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan menggandeng OBH untuk menyebarluaskan pelaksanaan bantuan hukum gratis baik litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum secara periodic dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu indeks layanan kepuasan bantuan hukum. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) pelaksanaan Bantuan Hukum telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh para PBH baik pada perkara perdata maupun pidana. Pada klien masyarakat perkara perdata, Tim Panwasda melakukan wawancara dan pengisian kuesioner langsung ke alamat yang bersangkutan. Adapun untuk klien masyarakat perkara Pidana, Tim Panwasda melaksanakan wawancara dan pengisian kuesioner ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dan Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan. Kuisioner yang telah diisi oleh penerima bantuan hukum tersebut kemudian di input kembali oleh operator SIDBANKUM ke dalam aplikasi dengan tautan <https://sidbankum.bphn.go.id/>. kemudian diperoleh hasil indkes kepuasan layanan bantuan hukum dengan rata-rata 80.

Berdasarkan hasil presentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80}{76.61} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 104 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 104 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.154

Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	80	104 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2021 mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 104 %.

Tabel 3.156

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	76.61	100 %	76.61	80	104 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam

Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 104 % dengan realisasi 80.

Tabel 3.157

Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis Organisasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	76.61	76.61	76.61	80	104 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kepuasan layanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum dengan cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga potensi pelanggaran serta penyimpangan dalam pemberian bantuan hukum oleh OBH bisa diminimalisir.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana oleh Panwasda Bantuan Hukum.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka

Belitung telah melaksanakan pembinaan terhadap desa/kelurahan sadar hukum dan pada saat ini untuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu berjumlah 41 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka persentase dari indikator tersebut dapat dihitung melalui:

$$\% = \frac{\text{Jumlah desa yang sudah sesuai dengan kriteria desa sadar hukum}}{\text{Jumlah usulan Kanwil}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{41}{41} \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Berdasarkan hasil presentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{70} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 142 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 142 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.158

Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %	100 %	142 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2021 mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 142 %.

Tabel 3.159 perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021	2022
-----------	------	------

	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %	70 %	100 %	70 %	100 %	142 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 142 % dengan realisasi 100 %.

Tabel 3.160

Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis Organisasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %	70 %	70 %	70 %	100 %	142 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum di setiap desa/kelurahan binaan, semakin meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga cita-cita hukum bisa tercapai melalui desa-desa.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak terlepas dari terlibatnya peran dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Hubungan kemitraan yang terjalin antara lain melalui kegiatan pembangunan hukum dalam pembentukan DSH seperti penyuluhan hukum dan pembinaan Kadarkum yang dilaksanakan secara rutin oleh JFT Penyuluh Hukum.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif”****1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif. Anggota JDIH yang ada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berjumlah 17 (tujuh belas) yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Kota Pangkalpinang, DPRD Kab. Bangka, DPRD Kab. Bangka Tengah, DPRD Kab. Bangka Barat, DPRD Kab. Bangka Selatan, DPRD Kab. Belitung, DPRD Kab. Belitung Timur, dan semua anggota sudah terintegrasi 100% dengan website JDIHN Pusat.

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka persentase dari indikator tersebut dapat dihitung melalui:

$$\% = \frac{\text{Jumlah anggota yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh anggota jdihn}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{17}{17} \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Berdasarkan hasil presentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{20} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 500 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 500 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.161

Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20 %	100 %	500 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2021 mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 500 %.

Tabel 3.162

perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20 %	20 %	100 %	20 %	100 %	500 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 500 % dengan realisasi 100 %.

Tabel 3.163

Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis Organisasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %	500 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- 1) Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dengan Biro Hukum Provinsi Bangka Belitung sebagai pusat JDIHN di daerah.
- 2) Keberadaan SDM yang berkompeten dalam mengatasi permasalahan teknis pada JDIH masing-masing wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Monitoring dan evaluasi JDIH ke daerah secara berkala kepada anggota JDIHN di daerah. Tujuannya adalah dilakukannya konsultasi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan JDIH dan perpustakaan fisik serta permasalahan yang dihadapi oleh para anggota JDIH.

SASARAN KEGIATAN 20
Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menghasilkan analisa melalui pemanfaatan aplikasi SIPKUMHAM dengan tema:

- 1) Kenaikan NJOP oleh Pemkot Pangkalpinang
- 2) Kekerasan Seksual terhadap Anak di Belitung Timur
- 3) Tingginya Angka *Stunting* di Bangka Barat
- 4) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pemkab Bangka

Dengan demikian untuk memperoleh presentase Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan ham perlu

dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{4}{4} \times 100 \%$$

$$\% = 100 \%$$

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai persentase sebesar 100%, sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$\text{Capain} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 125 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.164

Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan ham	80 %	100 %	125 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM tahun 2021 mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 125 %.

Tabel 3.165

perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	70 %	70 %	100 %	80 %	100 %	125 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 125% dengan realisasi 100 %.

Tabel 3.166

Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis Organisasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	70 %	80 %	80 %	80 %	100 %	125 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi terkait HAM guna mendapatkan data yang akurat dalam pengolahan data.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Analisa Kebijakan yang sebelumnya

telah menghasilkan suatu rekomendasi agar untuk tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah rekomendasi.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Hasil penelitian hukum dan ham yang disosialisasikan di wilayah. Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan sosialisasi melalui Diskusi Obrolan Peneliti (Opini) dengan Tema **“Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI”** telah dilaksanakan pada Kamis, 24 Maret 2022 dengan melibatkan akademisi, peneliti, praktisi, K/L/D/I, dan masyarakat baik secara virtual (970) maupun hadir langsung di balai pengayoman Kanwil (1870 partisipan yang mendaftar). Dengan adanya Diskusi Opini, hasil kajian penelitian berupa hasil rekomendasi, P2PR, *policy brief*, *policy paper*, tidak hanya diketahui sedikit pihak tetapi juga banyak pihak yang lebih mengetahui dengan lebih jelas sesuai dengan tagline Balitbang “Kritis mencerdaskan”, menjadi slogan yang menyemangati, tidak hanya untuk kepentingan internal Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan data tersebut, capaian IKK Tahun 2022 dapat diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{1}{1} \times 100 \%$$

$$Capaian = 100 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK selama tahun 2022 sebesar 100 %. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.167

Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	100 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah tahun 2021 mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 100 %.

Tabel 3.168

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IKK Tahun 2022 dan 2021

Indikator	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %	1 Buku	1 Buku	100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2022 sebesar 125% dengan realisasi 100 %.

Tabel 3.169

Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis Organisasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	100 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasikan di

wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Penyebab Keberhasilan

Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan sosialisasi hasil penelitian hukum dan ham yang fasilitasi oleh Kantor Wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dukungan dari berbagai stakeholder terutama unit Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dalam rangka mensukseskan kegiatan sosialisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.170 Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Dan Unit
Pelaksana Teknis Tahun 2022**

NO	KANTOR/ SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	KANTOR WILAYAH			
	KANWIL (SETJEN)	14.001.723.000	13.993.407.079	99,94%
	KANWIL (AHU)	2.026.710.000	2.026.103.273	99,97%
	KANWIL (PAS)	624.666.000	623.470.200	99,92%
	KANWIL (IMIGRASI)	1.252.628.000	1.251.605.200	99,10%
	KANWIL (KI)	901.819.000	901.644.292	99,98%
	KANWIL (PP)	172.285.000	171.966.990	99,82%
	KANWIL (DITJEN HAM)	233.497.000	233.452.370	99,98%
	KANWIL (BPHN)	771.490.000	765.892.999	99,27%
	KANWIL (BALITBANG KUMHAM)	190.146.000	189.436.100	99,63%
2	LAPAS KLAS IIA PANGKALPINANG	10.851.207.000	10.843.871.717	99,93%

3	LAPAS KLAS IIB SUNGAILIAT	9.521.160.000	9.387.279.414	98,59%
4	LAPAS KLAS IIB TANJUNGPANDAN	15.012.689.000	14.974.716.382	99,75%
5	LAPAS KLAS III NARKOTIKA PKP	16.269.052.000	15.917.982.665	97,84%
6	BAPAS PANGKALPINANG	4.551.786.000	4.539.173.226	99,72%
7	RUPBASAN PANGKALPINANG	2.279.107.000	2.274.073.513	99,78%
8	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	4.984.604.000	4.902.217.868	98,35%
9	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	9.258.327.000	9.247.123.481	99,88%
10	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	7.425.918.000	7.383.843.124	99,43%
11	LPP KELAS III PANGKALPINANG	5.656.981.000	5.634.060.864	99,59%
12	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	5.183.434.000	5.029.147.332	97,02%
TOTAL		111.169.229.000	110.290.468.089	99,21%

Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 110.290.468.089,- dengan persentase 99,21% dari pagu anggaran sebesar Rp. 111.169.229.000,-

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. APLIKASI SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari :

1. Capaian keluaran;
2. Penyerapan anggaran;
3. Efisiensi.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (deviasi RPD awal dan akhir)

**Tabel 3.171 Nilai SMART DJA Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Unit Pelaksana Teknis
Tahun 2022**

NO	SATUAN KERJA	NILAI SMART
1	KANTOR WILAYAH	
	SETJEN	99.46
	DITJEN PAS	97.08
	DITJEN IMIGRASI	99.94
	DITJEN AHU	100
	DITJEN KI	99.59
	DITJEN PP	97.72
	DITJEN HAM	98.49
	BPHN	97.58
	BALITBANGKUMHAM	99.96
2	LAPAS KLAS IIA PANGKALPINANG	93
3	LAPAS KLAS IIB SUNGAILIAT	94.48
4	LAPAS KLAS IIB TANJUNGPANDAN	95.74
5	LAPAS KLAS III NARKOTIKA PKP	67.79
6	BAPAS PANGKALPINANG	85.48
7	RUPBASAN PANGKALPINANG	99.24
8	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	99.58
9	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	88.38
10	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	95.74
11	LPP KELAS III PANGKALPINANG	99.92
12	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	87.34

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat nilai SMART Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran Unit Pelaksana Teknis terdapat nilai yang belum maksimal dikarenakan adanya deviasi yang cukup berpengaruh akibat adanya *Automatic Adjusted* dan pembukaan blokir anggaran yang menyebabkan tidak konsistennya rencana penarikan dana halaman III DIPA.

2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;
3. Data Kontrak;
4. Penyelesaian Tagihan;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Dispensasi SPM;
7. Penyerapan Anggaran;
8. Capaian Output.

Tabel 3.172 Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022

NO	Satuan Kerja	Nilai IKPA
1	KANWIL (SETJEN)	94.37
2	KANWIL (DITJEN PAS)	91.25
3	KANWIL (DITJEN IMIGRASI)	96.46
4	KANWIL (DITJEN AHU)	100
5	KANWIL (DITJEN KI)	96.50
6	KANWIL (DITJEN PP)	95.22
7	KANWIL (DITJEN HAM)	96.58
8	KANWIL (BPHN)	96.43
9	KANWIL (BALITBANGKUMHAM)	98.04
10	LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG	97.59
11	LAPAS KELAS IIB SUNGAILIAT	97.97
12	LAPAS KELAS IIB TANJUNGPANDAN	93.85

13	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG	95.88
14	BAPAS PANGKALPINANG	98.68
15	RUPBASAN PANGKALPINANG	98.02
16	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	93.17
17	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	97.16
18	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	96.33
19	LPP KELAS III PANGKALPINANG	98.20
20	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	98.40
NILAI IKPA WILAYAH		96.51

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai SMART Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 96.51.

D.CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

https://e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2022&ed_unit_kerja=26

80%

Home

Dashboard

BSC

Input Data

Perencanaan

Realisasi

Lainnya

Ubah Password

Keluar

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2022
DIVISI ADMINISTRASI BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN	BSC		
					KELUAR	MAJUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN		LAMPIRAN	MONITORING	BOBOT
1.	Terselenggaranya layanan administrasi dan kepastian Kantor Wilayah yang efektif dan efisien		1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah 			3.1 Indeks Timbulan IV	791	9.3	Indeks	11.3	128	Januari : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham Februari : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham Maret : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham April : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham Mei : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham Juni : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham Juli : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham Agustus : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham September : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham Oktober : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham November : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham Desember : Berdasarkan Hasil Survey Integrasi Bekasbangkumham		0	0
				Sasaran Kinerja Pegawai :												

Active Windows

Go to Settings to activate Windows.

Windows Taskbar

Hujan sesekali

13:57

26/12/2022

Kegiatan yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 9 Indikator Kegiatan yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2022 mencapai target (=100%) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Terdapat 40 Indikator Kegiatan yang Nilai Capai Kinerjanya pada Tahun 2022 melebihi target (diatas 100%) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Terdapat 4 Indikator Kegiatan yang Nilai Capaian Kinerjanya pada Tahun 2022 kurang dari target (dibawah 100%) yaitu 80% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dapat dirincikan sebagai berikut :
 - a) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum belum mencapai target dikarenakan pada tahun 2022 hanya 250 tahanan yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
 - b) Pada Tahun 2022, Narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan hak Remisi adalah 2.967 WBP, akan tetapi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya 2.816 WBP.
 - c) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan belum mencapai target yang telah ditentukan karena hanya 184 WBP yang mendapatkan Pendidikan pada Tahun 2022.
 - d) Jumlah Andikpas yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat pada Tahun 2022 hanya 15 orang dari total Andikpas pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

4. Terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak tercapai pada Tahun 2022 pada Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yaitu Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi dikarenakan tidak ada narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang mengikuti Pendidikan Tinggi.

2. TARGET KINERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Memiliki Target Kinerja sebanyak 39 Target Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Divisi Administrasi memiliki 11 Target Kinerja
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki 14 Target Kinerja
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan memiliki 11 Target Kinerja
4. Kepala Divisi Keimigrasian memiliki 3 Target Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan *Action Plan* Target Kinerja mulai B03 hingga B12 tahun 2022 dengan capaian nilai sebagai berikut :

Tabel 3.173 Capaian Target Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2022

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University	100	100	100	100
2	Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah	-	100	-	100
3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100	100	100	100
4	Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80%	100	100	100	100
5	Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70	100	100	100	100
6	Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran	100	100	100	100

	dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid-19				
7	Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95	100	100	100	100
8	Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR	100	100	100	100
9	Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				100
10	Pelaksanaan Manajemen Risiko	100	100	100	100
11	Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan e-performance tepat waktu	100	100	100	100

Tabel 3.174 Capaian Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2022

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	100
2	40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100
3	70% Desa/Kelurahan sadar hukum	100	100	100	100
4	Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	100	100	100	100
5	Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	100	100	100	100
6	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100
7	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	100	100	100	100
8	Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	100	100	100	100
9	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)	100	100	100	100
10	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham	100	100	100	100
11	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka	100	100	100	100

	meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah				
12	Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait	100	100	100	100
13	Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic	100	100	100	100
14	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual	100	100	100	100

Tabel 3.175 Capaian Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA	100	100	100	100
2	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	100	100	100	100
3	Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding diatas 300%	100	90	100	100
4	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	100	100	100	100
5	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	100	100	100	100
6	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	100	100	100	96.66
7	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini; 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	100	100	100	95
8	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	100	100	95	98.33
9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan	100	100	100	100
10	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri 3. Palembang, Sumsel 4. Yogyakarta, DIY 5. Tanjung Selor, Kalimantan	100	100	100	100

11	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan	-	100	100	100
----	--	---	-----	-----	-----

Tabel 3.176 Capaian Target Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2022

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B02	B05	B08	B11
1	Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat , tepat dan berbasis IT	100	100	100	100
2	Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi	100	100	100	100
3	Implementasi Mobile Paspor	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berada pada Zona Hijau yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

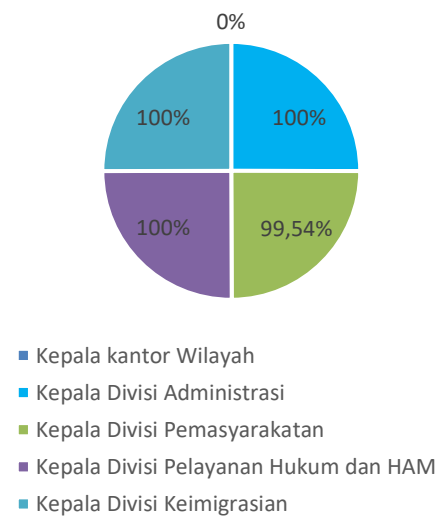
1. Capaian Target Kinerja Divisi Administrasi telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.
2. Capaian Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.
3. Capaian Target Kinerja Divisi Pemasarakatan terdapat 2 (satu) target kinerja yang belum sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 99,54%.
4. Capaian Target Kinerja Divisi Keimigrasian telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.

Sebagai bahan perbandingan, berikut disajikan capaian Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

Tabel 3.177 Perbandingan Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021 dan 2022

No	Kepala Kantor Wilayah/Divisi	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Kepala Kantor Wilayah	100%	-
2	Kepala Divisi Administrasi	100%	100%
3	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	98,75%	100%
4	Kepala Divisi Pemasyarakatan	100%	99,54%
5	Kepala Divisi Keimigrasian	100%	100%

Grafik 3.2 Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022



Berdasarkan kondisi tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa Target Kinerja Divisi Administrasi dan Divisi Keimigrasian masih menduduki Posisi Hijau dengan Nilai 100% sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2022. Sedangkan untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, belum memperoleh nilai 100% pada Tahun 2021 atau 98,75% dan Tahun 2022 telah mencapai Nilai 100%. Sedangkan Divisi Pemasyarakatan mencapai nilai 100% pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 99,54% dimana terdapat kekurangan berdasarkan keterangan verifikator yaitu Data Dukung kurang sempurna berupa :

1. Data yang dilaporkan bukan berbentuk sebuah laporan. Harap untuk selanjutnya dibuatkan sebuah laporan yang format sistematikanya sesuai dengan TNDE dan di TTD Kadivpas/Kakanwil;
2. Data dan informasi kurang sesuai dengan target kinerja karena data Penilaian SPPN yang direkap, tidak memuat data Penilaian SPPN pada bulan.

1. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan

pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

**Tabel 3.178 Capaian Realisasi Anggaran pada e-Monev Bappenas
Tahun 2022**

NO	SATUAN KERJA	PERSENTASE
1	SETJEN	100
2	DITJEN PAS	100
3	DITJEN IMIGRASI	99.9
4	DITJEN AHU	100
5	DITJEN KI	100
6	DITJEN PP	100
7	DITJEN HAM	100
8	BPHN	100
9	BALITBANGKUMHAM	100

2. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2022 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH memangku salah satu program prioritas nasional yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin/kurang mampu. Realisasi pemberian bantuan hukum oleh Kantor Wilayah adalah sebagai berikut:

- Permohonan bantuan Hukum Litigasi sebanyak 122 permohonan; diterima sebanyak 103, dan ditolak sebanyak 19 permohonan;
- Permohonan bantuan Hukum Non Litigasi sebanyak 63 permohonan, diterima sebanyak 42, dan ditolak sebanyak 21 permohonan.

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja 2022 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Realisasinya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Nilai Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 186%, meningkat daripada Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan rata - rata sebesar 154%.

Selain itu, dapat disimpulkan Capaian Kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada setiap Divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

I. Divisi Administrasi

1. Sasaran Program Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham dengan target 1 Layanan mendapat capaian kinerja yang baik yaitu sebesar 126%.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2022 dengan DIPA **Rp 14.001.723.000,-** sasaran programnya adalah Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham, Per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan aplikasi OM-SPAN telah direalisasikan secara keseluruhan sebesar **Rp 13.993.407.079,-** atau dipersentasekan **99.94%**.

II. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dari uraian LKIP Tahun 2022 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program dan target yang telah ditetapkan selama periode anggaran tahun 2022;
2. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan dengan catatan beberapa kekurangan yang harus diperbaikidan ditingkatkan di tahun anggaran 2023 untuk mencapai target yang ditetapkan;

3. Beberapa sektor program kegiatan masih perlu dioptimalkan untuk perbaikan pada tahun anggaran 2023;
4. Realisasi anggaran tahun 2022 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pagu DIPA Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen HAM, Ditjen KI, BALITBANG HUKUM & HAM dan BPHN adalah 99.83 % per tanggal 31 Desember 2022.
5. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan rata-rata capaian kinerja keuangan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar 99.77 % dari sebanyak 6 DIPA Eselon I. Rincian rata-rata sebagai berikut:
 - 6 (enam) DIPA Eselon I dengan capaian kinerja keuangannya tinggi (di atas 99%)

III. Divisi Keimigrasian

Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sasaran yang dicapai tahun 2022 terdapat satu sasaran untuk Divisi Keimigrasian sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;
3. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat dua indikator kinerja untuk Divisi Keimigrasian yang telah ditetapkan tahun 2022;
4. Dari dua indikator kinerja, semua indikator tercapai;
5. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, capaian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebesar 99.92 %.

IV. Divisi Pemasyarakatan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan selama tahun 2022 secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan dan serapan anggaran yang baik.

2. Secara umum realisasi kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022 sebesar 147.5 %
3. Terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan belum mencapai target yang ditentukan yaitu Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum, Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan, Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dan belum adanya narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi Divisi Pemasyarakatan guna perbaikan kinerja kedepannya.
4. Kinerja keuangan Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan dalam APBN Divisi Tahun 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2022 adalah sebesar Rp 772.182.000,- namun pada tahun berjalan juga adanya pergeseran anggaran untuk pemenuhan BAMA sebesar Rp 147.516.000,- sehingga Pagu setelah Revisi sebesar Rp.664.666.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 623.470.200,- atau sebesar 99.81%.

2. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut untuk meningkatkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat saran yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua elemen pelaksana 9 (sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan juga Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Administrasi pada Tahun berikutnya disarankan agar mengoptimalkan kegiatan yang mendukung tercapainya target yang telah disepakati di Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pemasyarakatan pada tahun

berikutnya disarankan untuk :

- a. Dalam rangka tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKIP yang baik perlu setiap tahunnya dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) LKIP.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan harus memperhatikan kalender kerja yang baik di pusat maupun daerah.
 - c. Untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan agar diprioritaskan anggarannya tiap tahun.
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Imigrasi pada tahun berikutnya disarankan untuk :
- a. Untuk mencapai capaian kinerja yang maksimal, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
 - b. Memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja, perlu dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kondisi real pada tiap Kantor Imigrasi;
 - e. Dalam mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu kekonsistenan masing-masing Bidang untuk menjalankan program yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada Divisi Keimigrasian
 - f. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.
 - g. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

pada tahun berikutnya disarankan untuk :

- a. Peningkatan sinergitas antar pihak terkait terutama di dalam internal maupun eksternal Divisi serta penguatan upaya sinergitas level yang semula di setiap kegiatan program hanya berskala sedang akan ditingkatkan menjadi skala besar di TA 2023;
- b. Penguatan komitmen dan kapasitas SDM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi prioritas di TA 2023 mengingat akan ada penyesuaian program pemerintah pusat di Tahun 2023 yaitu Program Prioritas Penguatan SDM;
- c. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing-masing bidang pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan mengarahkan kepatuhan dan ketepatan pembentukan perencanaan program kerja dengan pelaksanaan program kerja yang berbasis Output dan Outcome.

Demikianlah uraian Laporan Kinerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga pada Tahun 2023 Nilai Capaian Kinerja Kantor Wilayah lebih meningkat daripada Nilai Capaian Kinerja Tahun 2022.

Penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yaitu:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berhasil memperoleh Predikat Terbaik atas kinerja berdasarkan parameter IKPA, SMART, nilai SAKIP, nilai WBK/WBBM dan Target Kinerja Kategori Kanwil Tipe C;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung meraih Penghargaan Apresiasi Pelopor Kontrak Pra DIPA Terbaik Kategori Kementerian Vertikal Tahun Anggaran 2022;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Menerima Penghargaan Dari Universitas Bangka Belitung Atas Peran Serta Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar;
4. Penghargaan apresiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas kreativitas pelayanan publik dalam penggagas inovasi peningkatan pelayanan Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung menerima penghargaan Kantor Wilayah dengan Nilai Kinerja Anggaran AHU Tertinggi II;
6. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Raih 6 Penghargaan Sekaligus Dari KPPN Pangkalpinang, antara lain :
 1. Kanwil Kemenkumham Babel (649003) meraih Peringkat Kedua Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Terbaik dalam Penyampaian LPJ - Kategori Pagu DIPA di bawah 2 Miliar Rupiah Semester II Tahun 2021;
 2. Kanwil Kemenkumham Babel (649007) meraih Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 99,2 - Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d. 10 Miliar Rupiah Tahun 2021;
 3. Kanwil Kemenkumham Babel (649008) meraih Peringkat Ketiga Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam Penyampaian LPJ - Kategori Pagu DIPA di bawah 2 Miliar Rupiah Semester II Tahun 2021;
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DJPb Babel) Kategori Penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.125.069.000
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 14.125.069.000

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

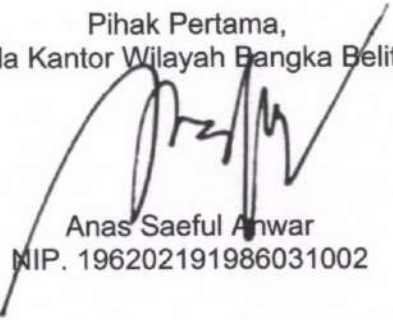
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.026.710.000
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.026.710.000

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

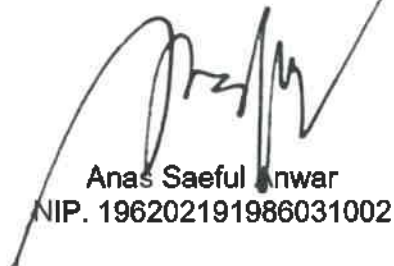
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muallimin Abdi

Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196292191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota Daerah memenuhi HAM.	40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 233.497.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 233.497.000,-

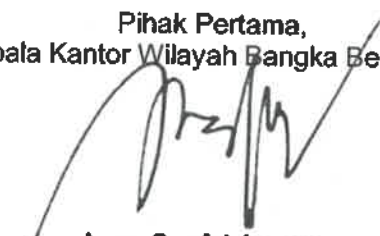
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196292191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196292191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	17 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 901.819.000
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 901.819.000

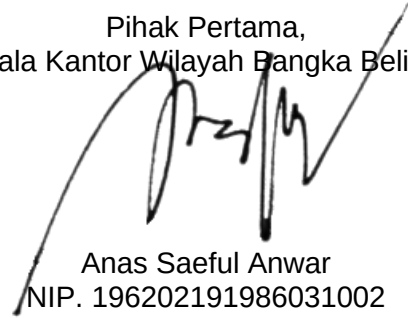
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

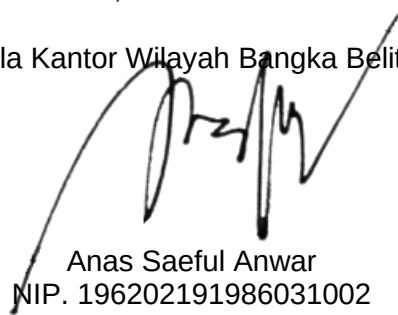
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.R. Benny Riyanto

Jabatan : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

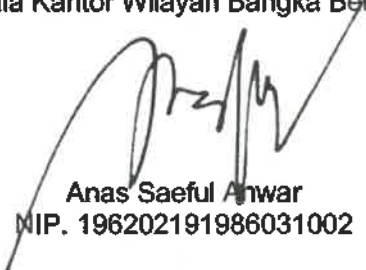
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 194.570.000
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 194.570.000

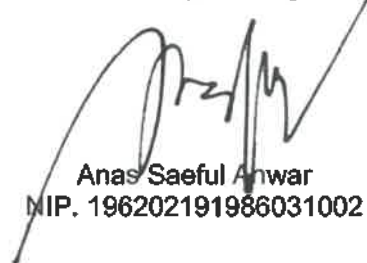
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

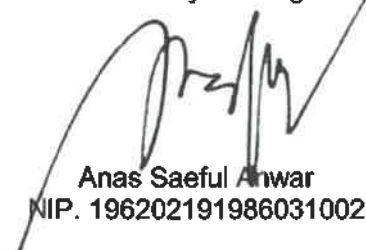
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

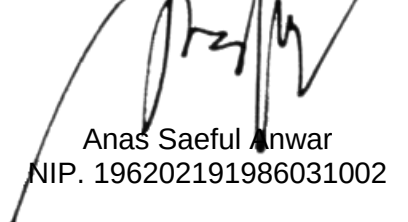
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 144.967.000
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 144.967.000
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 813.958.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 813.958.000

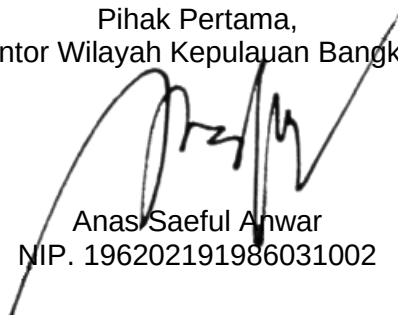
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

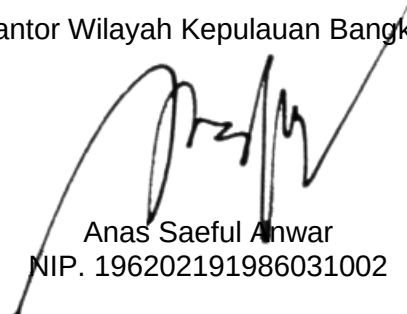
Nama : Anas Saeful Anwar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Puguh Budi Utami
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANGKA BELITUNG DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 253.831.000
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 253.831.000

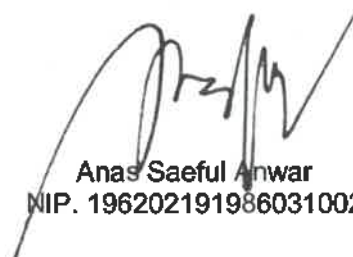
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

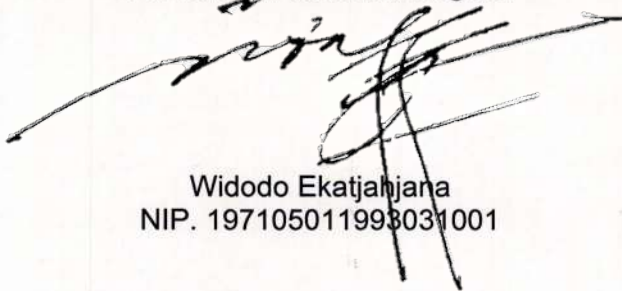
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.185.085.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.185.085.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.437.893.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 11.437.893.000,-

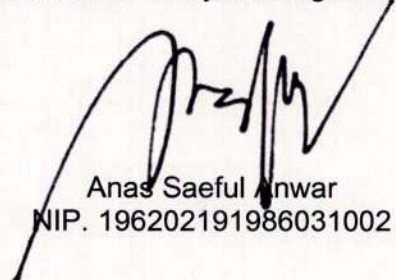
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saepul Anwar

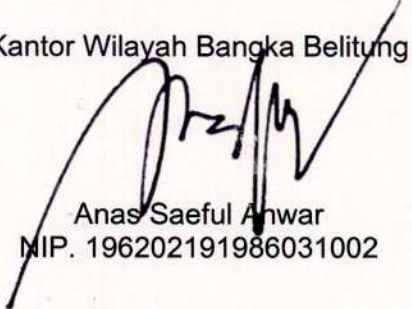
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

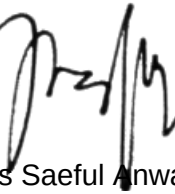
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 772.182.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 772.182.000

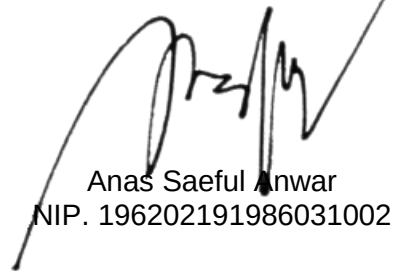
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Saeful Anwar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Anas Saeful Anwar
NIP. 196202191986031002



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KANTOR WILAYAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG